



UNIVERSITAS INDONESIA

**Kepentingan Ekonomi Politik Inggris dalam Menerapkan Sistem Ekonomi
dan Keuangan Islam (2004-2010)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di
Universitas Indonesia**

YANUAR PRIAMBODO

0806322981

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**

DEPOK

2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**Kepentingan Ekonomi Politik Inggris dalam Menerapkan Sistem
Ekonomi dan Keuangan Islam (2004-2010)**

SKRIPSI

YANUAR PRIAMBODO

0806322981

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

DEPOK

2012

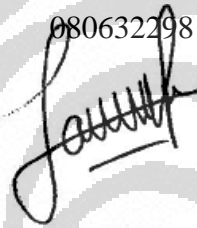
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas skripsi ini adalah hasil karya diri saya sendiri,
dan semua sumber yang baik dirujuk maupun dikutip
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : YANUAR PRIAMBODO

NPM : 0806322081

Tanda Tangan :



Tanggal : Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Yanuar Priambodo

NPM : 0806322981

Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

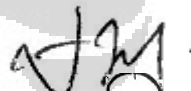
Judul Skripsi :

“Kepentingan Ekonomi Politik Inggris dalam Menerapkan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam (2004-2010)”

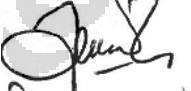
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Utaryo Santiko, S.Sos., M.Si.

()

Sekretaris : Aninda Tirtawinata, S.Sos., M.Litt.

()

Penguji Ahli : Asra Virgianita, S.Sos., M.A.

()

Pembimbing : Syamsul Hadi, Ph.D

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmatNya, karuniaNya, dan segala berkahNya hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Kemunculan sistem ekonomi Islam modern pada dekade 1960-an di Timur Tengah memberikan spektrum lain dalam kajian ekonomi politik internasional. Satu hal yang patut diingat adalah, ekonomi Islam notabene berasal dari syariat Islam dan sumber primernya adalah Al-quran dan Hadist.

Sekarang ini, ekonomi Islam berkembang hingga tataran global. Ekonomi Islam tidak lagi secara eksklusif terikat pada negara-negara Islam di Timur Tengah. Bahkan, di negara-negara Barat pun sekarang ekonomi Islam berkembang seiring dengan perkembangan konstelasi ekonomi politik internasional yang dinamis.

Salah satu contoh nyata adalah Inggris. Pada tahun 2004, Inggris mendirikan *Islamic Bank of Britain* sebagai bank berbasis syariah pertama di Inggris, bahkan Eropa dan negara-negara Barat. Sejak saat itu pula, Inggris bercita-cita untuk menjadi salah satu pusat keuangan Islam pertama di dunia Barat.

Penulis di satu sisi menyadari bahwa masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik secara teknis maupun substansi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dan dapat memperkaya penelitian ini. Pada akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Depok, Juli 2012

Yanuar Priambodo

UCAPAN TERIMA KASIH

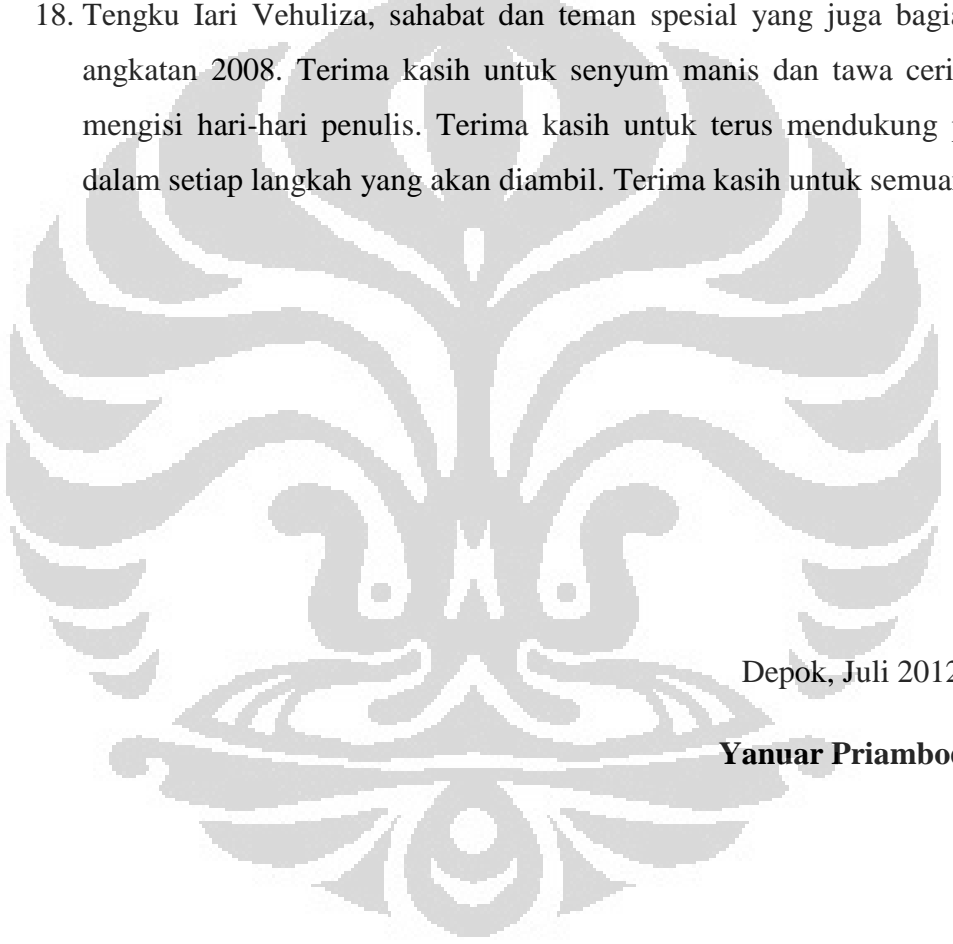
Penulis memanjatkan puji syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menyertai penulis dalam segala kondisi terutama pada masa 4 tahun perkuliahan. Dengan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin berterima kasih sedalam-dalamnya terhadap pihak-pihak yang membantu penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Syamsul Hadi, Ph.D. selaku pembimbing penulis atas kesediaannya menjadi pembimbing dan telah menyediakan waktu di tengah segala kesibukannya. Terima kasih atas segala ilmu yang membangun logika berpikir penulis. Berkat bimbingan beliau pula, penulis mengerti mengenai penulisan ilmiah yang baik.
2. Asra Virgianita, S.Sos., M.A. selaku penguji ahli, terima kasih atas segala kritik dan sarannya pada sidang skripsi yang sangat berguna dalam menyempurnakan skripsi penulis.
3. Andi Widjajanto, Ph.D. selaku ketua program S1 Hubungan Internasional. Terima kasih atas segala masukannya pada saat sidang *outline* yang sangat berguna bagi penulisan skripsi penulis.
4. Suzie Sri Suparin Sudarman, M.A., Ph.D. selaku pembimbing akademis penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan arahnya dalam menjalani perkuliahan.
5. Dwi Ardhanariswari, M.A. selaku pengajar mata kuliah SPM. Terima kasih atas keramahan sekaligus ketegasannya dalam menjawab segala pertanyaan penulis selama masa persiapan pra-skripsi.
6. Dosen-dosen pengajar *cluster* Ekonomi Politik Internasional seperti Bpk. Makmur, Mas Syamsul, Mas Tirta, Mbak Asra, Mbak Dewi, dan Mbak Yuni. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diajarkan. Segala ilmu yang diajarkan telah membantu penulis dalam memahami dinamika dan fenomena ekonomi politik internasional.
7. Kedua orang tua penulis yaitu (Alm.) Dwi Hari Sugeng Priyono dan Titik Tugas Herawati. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus dan tidak pernah putus. Terima kasih telah mengajarkan penulis mengenai ilmu

kehidupan. Terima kasih untuk segalanya yang engkau telah berikan selama ini.

8. Adik penulis yaitu Anandya Kurniawan. Terima kasih atas pengertiannya, untuk menjadi lebih dewasa ketimbang teman-temanmu pada umumnya.
9. Sahabat terdekat penulis yaitu: Ganes Agni Wibisono, Muhammad Nurul Fajri, Said Yogi Saputra, Agung Aribowo, dan Aulia Triswardhana. Terima kasih untuk segala cerita dan mimpi yang kita bagi. Yakinlah kawan, suatu saat kita akan sampai di tujuan.
10. Teman-teman Sedhotan. Sahabat serta keluarga penulis di luar rumah yang senantiasa menjadi tempat bercanda sekaligus tempat pendewasaan diri yang paling nyaman.
11. Terima kasih untuk teman-teman HI UI angkatan 2008, khususnya: OK dan Iqbal teman sedari awal masuk kuliah, Adi si 'bonek intelektual', Kohar dan Kun yang mengajarkan penulis betapa hidup santai itu penting, Agung yang senantiasa bermimpi menjadi artis, TB. Ari yang banyak membantu penulis dalam memahami yang 'sulit dipahami', Gita dan Machfudz yang baik dan rendah hati, Dafy si atlet basket yang memuja banyak wanita, Lesly si Yahudi yang akan selalu penulis anggap demikian karena kecerdasan dan keculasannya, Zhahwa si ratu gila urusan abad ini, Ipeh dengan keluguan yang menyayat hati, Chei yang tampak seperti Nunung waktu remaja, Citra si pencuri korek, Dwi si ratu gosip yang suka memicingkan mata, Adhy Eraldo putra mahkota Bengkulu, Joan anak Betawi yang tidak ketinggalan jaman, serta Weki *arek* Malang teman senasib sepenanggungan dalam pengerjaan skripsi.
12. Teman-teman angkatan 2008 lainnya yang selalu menjadi panutan bagi penulis. Semoga sukses selalu menyertai teman-teman 2008.
13. Senior HI 2007 yang inspiratif: Bajora Rahman, *role model* penulis dalam dunia akademis.
14. Senior HI 2005, Geradi Yudhistira, teman diskusi yang 'mencerahkan'.
15. Senior HI 2003, Shofwan Al-Banna Choiruzzad, terima kasih untuk waktunya untuk bimbingan informal melalui *e-mail*.

16. Teman-teman angkatan 2009: Mikha yang menyimpan hasrat untuk menjamah Indonesia, Ryan 'baon' pemimpin muda yang pandai bermain gitar, Pandu yang asyik, Arif yang diproyeksikan menjadi *scholar* HI yang berpengaruh di dunia internasional, dan Ponda teman berbagi yang menyenangkan dari Singkawang.
17. Teman-teman angkatan 2010 yang membuat penulis tidak merasa tua: Tia dan Binar, terima kasih untuk keceriaannya, Fadhil, Irfan, Abiet, Cio, Naufal, Kharisma, Mire, Santi, Carol, Clara, Uli, dll.
18. Tengku Iari Vehuliza, sahabat dan teman spesial yang juga bagian dari angkatan 2008. Terima kasih untuk senyum manis dan tawa ceria yang mengisi hari-hari penulis. Terima kasih untuk terus mendukung penulis dalam setiap langkah yang akan diambil. Terima kasih untuk semuanya.



Depok, Juli 2012

Yanuar Priambodo

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanuar Priambodo
NPM : 0806322981
Program Studi : S1-Reguler Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

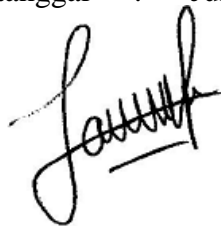
“Kepentingan Ekonomi Politik Inggris dalam Menerapkan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam (2004-2010)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Juli 2012



Yang menyatakan

Yanuar Priambodo

ABSTRAK

Nama : Yanuar Priambodo
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul :

“Kepentingan Ekonomi Politik Inggris dalam Menerapkan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam (2004-2010)”

Kehadiran *Islamic Bank of Britain* (IBB) di tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam studi ekonomi dan keuangan Islam. Kehadiran IBB bisa diartikan sebagai ‘ekspansi’ pertama sistem ekonomi dan keuangan Islam di luar Timur Tengah dan negara-negara Islam. IBB adalah bank ritel pertama berbasis syariah yang mendapatkan otorisasi dari *Financial Services Authority* (FSA). Sejak didirikannya IBB, kondisi ekonomi dan keuangan Islam di Inggris semakin berkembang pesat. Bahkan, Inggris adalah negara Barat (non-muslim) pertama yang berhasil menembus peringkat sepuluh besar negara-negara dengan aset keuangan Islam terbesar di dunia. Posisi ini kemudian menjadi semakin menarik karena langkah Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam ini berimbas pada perputaran dana *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan Petrodolar dari kawasan Teluk (GCC) yang notabene negara-negara Islam eksportir minyak yang kaya raya. Perbankan syariah, sebagai unit keuangan Islam, juga diyakini lebih kokoh akan gangguan krisis finansial yang sering kali meneror kondisi finansial negara-negara Barat seperti Inggris. Dewasa ini, banyak ekonom yang mempertimbangkan sistem ekonomi dan keuangan Islam sebagai sistem alternatif dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional atau kapitalisme yang cenderung destruktif.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Keuangan Islam, Perbankan syariah, SWF, FDI, Petrodolar

ABSTRACT

Name : Yanuar Priambodo
Study Program : Ilmu Hubungan Internasional
Title :

“The UK’s Political Economy Interest in Implementing Islamic Economics and Islamic Finance (2004-2010)”

The establishment of Islamic Bank of Britain (IBB) in 2004 is a milestone to the Islamic economics and Islamic finance studies. This can be understood as the first ‘expansion’ of Islamic economics and Islamic finance outside the Gulf, Middle East, and, of course, Islam world. IBB is the first retail sharia-compliant bank which authorized by the British Financial Services Authority (FSA). Since then, the growth of Islamic economics and Islamic finance in the United Kingdom (UK) has been remarkable. Moreover, UK is the first western state which posited in the top 10 list country with a huge number of Islamic economics and Islamic finance asset and volume. This position give an interesting point in implementing Islamic economics and Islamic finance which affected by petrodollar recycling and sovereign wealth fund from the Gulf (Islamic and oil-exporting country). Islamic banks, as the unit of Islamic finance, are believed to be more resilient in times of financial crisis. Many economists considered Islamic economics and Islamic finance system as the alternative system to the world economy (conventional) or capitalism, which is destructive.

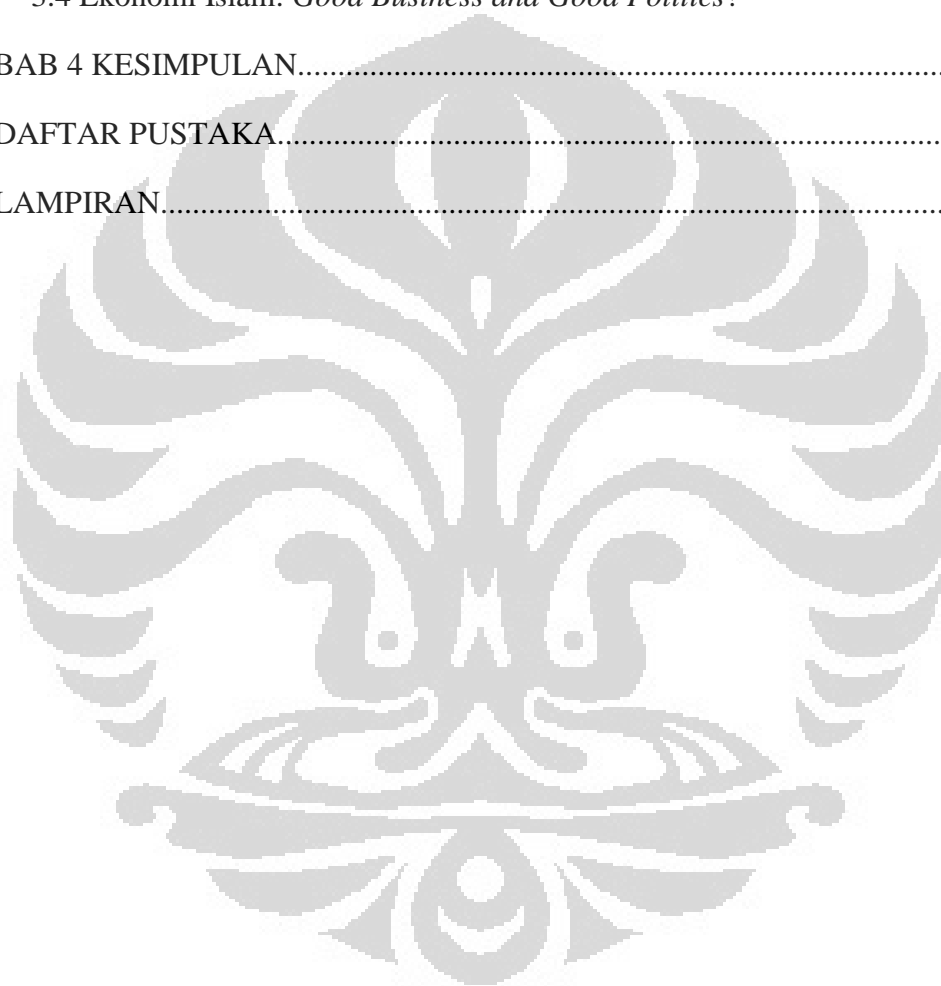
Key words: Islamic Economics, Islamic Finance, Islamic Bank, SWF, FDI, Petrodollar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
UCAPAN TERIMA KASIH.....	V
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	VIII
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	VIII
ABSTRAK.....	IX
ABSTRACT.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL.....	XIV
DAFTAR GRAFIK.....	XV
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Tinjauan Pustaka.....	6
1.3.1 Ekonomi Islam dalam Konteks Dinamika Ekonomi Politik Internasional.....	7
1.3.2 Kebijakan Pemerintah Inggris yang Mengakomodasi Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Alternatif.....	9
1.3.3 Dinamika Ekonomi dan Keuangan Islam di Jerman.....	11
1.4 Kerangka Pemikiran.....	14
1.4.1 Definisi Ekonomi Islam dalam Dinamika Ekonomi Politik.....	14

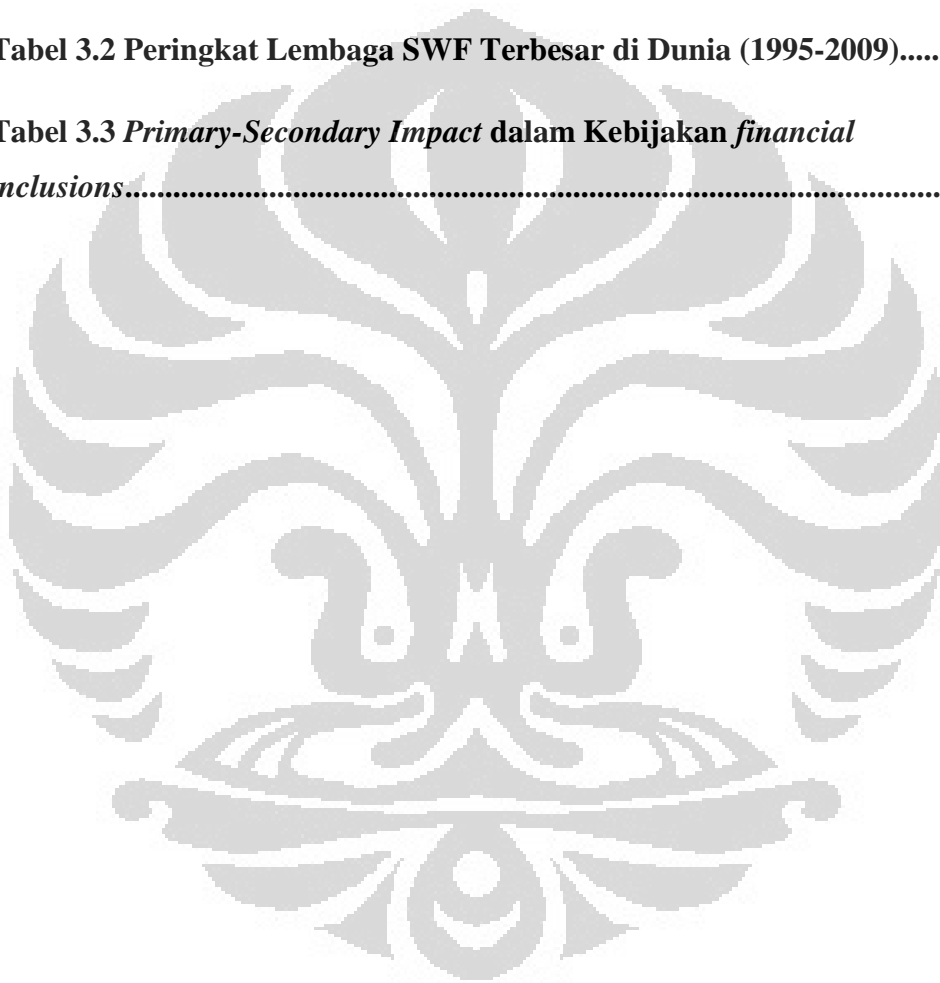
1.4.2 <i>Sovereign Wealth Fund</i>	18
1.4.3 <i>Foreign Direct Investment</i>	21
1.4.4 Petrodollar.....	23
1.4.5 <i>Financial Exclusions</i>	24
1.5 Metodologi.....	26
1.6 Asumsi.....	27
1.7 Hipotesis.....	27
1.8 Model Analisis.....	28
1.9 Tujuan dan Sistematika Penulisan.....	28
1.10 Sistematika Penulisan.....	29
BAB 2 DINAMIKA SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI	30
INGGRIS	
2.1 Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam di Inggris.....	30
2.1.1 Kelebihan Likuiditas di Timur Tengah.....	38
2.2 Pengaruh Aspek Ekonomi Politik dalam Perkembangan Ekonomi Islam di	43
Inggris.....	
2.2.1 Aspek Ekonomi.....	43
2.2.2 Aspek Politik.....	46
2.2.2.1 Kebijakan Pemerintah Inggris yang Akomodatif Terhadap	46
Perkembangan Perbankan Syariah.....	
2.3 Motivasi Inggris dalam Menjadikan Kota London Sebagai Pusat	50
Keuangan Syariah Dunia.....	
BAB 3 KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK INGGRIS DALAM	53
PENERAPAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM	
3.1 Analisis Peranan Faktor Ekonomi Politik dalam Sistem Ekonomi dan	53
keuangan Islam di Inggris.....	
3.1.1 Petrodolar, SWF, dan FDI Sebagai Faktor Ekonomi Terhadap	54
Perkembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam di Inggris.....	

3.2 <i>Financial Exclusions</i> Sebagai Faktor Politik dalam Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Islam di Inggris.....	61
3.2.1 Peranan <i>Muslim Council of British</i> dan <i>Islamic Finance Council</i> Sebagai Lembaga Masyarakat dalam Perkembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam di Inggris.....	65
3.3 Peran Penting Hubungan Kerja Sama Bank Syariah Internasional Antara Inggris – Timur Tengah.....	67
3.4 Ekonomi Islam: <i>Good Business and Good Politics?</i>	70
BAB 4 KESIMPULAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Muslim di Eropa (2008)	12
Tabel 1.2 Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional	15
Tabel 2.1 Bank Islam di Inggris (2009)	37
Tabel 3.1 SWF Market Share (2009)	59
Tabel 3.2 Peringkat Lembaga SWF Terbesar di Dunia (1995-2009)	60
Tabel 3.3 <i>Primary-Secondary Impact</i> dalam Kebijakan <i>financial inclusions</i>	65



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Peringkat Aset Ekonomi dan Keuangan Islam Dunia (2009).....	2
Grafik 1.2 Penyebaran Ekonomi dan Keuangan Islam Global (2009).....	2
Grafik 1.3 Faktor-Faktor <i>Financial Exclusions</i>	26
Grafik 2.1 Kenaikan Jumlah Deposito dan Pelanggan <i>Islamic Bank of Britain</i> (2004-2007).....	35
Grafik 2.2 Investasi Berupa SWF di Negara-Negara Eropa (% <i>Share</i> , 1995-2009).....	36
Grafik 3.1 Skema Umum <i>Petrodollar Recycling</i>	56
Grafik 3.2 Korelasi Pertumbuhan Bank Islam dengan Harga Minyak Dunia (1925-2005).....	57
Grafik 3.3 Investasi SWF di Inggris (2000 - 2008).....	60
Grafik 3.4 Tujuan Pemerintah Inggris dalam Mempromosikan <i>financial inclusions</i>	64
Grafik 3.4 Peran <i>Islamic Finance Council</i>	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

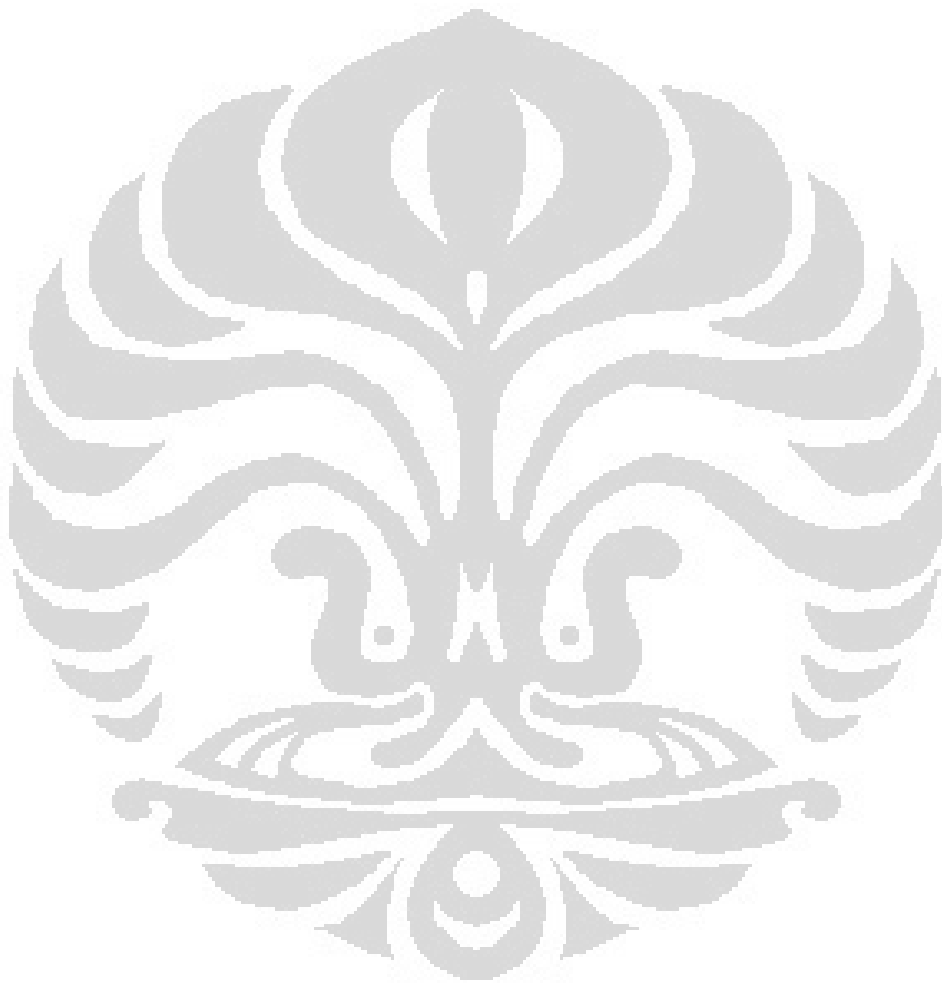
Islamic Finance dan *Islamic Economics* adalah fenomena ekonomi yang baru-baru ini hangat diperbincangkan kembali dalam dinamika perekonomian global. Sebelumnya kedua hal ini hanya melekat erat dengan dunia Islam, termasuk kawasan Timur Tengah yang mayoritas adalah negara-negara Islam. Dewasa ini, ekonomi dan keuangan Islam mulai dipelajari dan bahkan diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim atau bukan negara Islam.

Penerapan ekonomi dan keuangan Islam ditandai dengan terbukanya pasar konvensional dengan menawarkan produk keuangan maupun perbankan yang berbasis syariah/Islam. Contoh yang paling konkret ketika pada tahun 2004, Inggris menjadi negara non-muslim pertama yang menerapkan sistem ini dengan mendirikan bank berbasis syariah pertama di tanah Eropa dan di kalangan negara-negara Barat, yaitu *Islamic Bank of Britain (IBB)*.

Ketika sistem ekonomi kapitalisme mengalami kerapuhan, peluang ekonomi Islam semakin terbuka luas untuk berkembang pesat. Gejala tersebut ditunjukkan ketika 36 negara di dunia telah mempraktekkan sistem ekonomi Islam, baik di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia.

Berikut adalah grafik yang menampilkan perkembangan ekonomi Islam di dunia beserta indikatornya.¹

¹ “Introduction to Islamic Economics”, diakses dari http://www.albalagh.net/Introduction-to-Islamic-Economics_Islamic_economics/, pada tanggal 3 Desember 2011, 19.01 WIB



Merujuk pada grafik 1.1, penulis melihat bahwa munculnya Inggris sebagai negara Barat pertama yang mampu masuk ke dalam peringkat 10 besar aset ekonomi dan keuangan Islam dunia merupakan hal yang unik. Hal ini lah yang menjadi dasar keingintahuan penulis untuk meneliti lebih lanjut apakah kepentingan Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam ini. Peringkat ke-8 dunia dalam hal aset sistem ekonomi dan keuangan Islam dan

Demikian pula dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi Islam. *Harvard University* merupakan salah satu universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi Islam tersebut. Di Inggris setidaknya ada enam universitas yang mengembangkan kajian-kajian ekonomi Islam, salah satunya adalah *Durham University*.² Uniknya, para kaum ekonom Islam, tidak hanya terdiri dari kalangan muslim, tetapi juga non muslim. Indikasi penguatan ekonomi Islam dari segi sains, kelembagaan, dan sistem ekonomi semakin kompetitif pada tataran global.

Menurut Siddiqi, faktor-faktor yang menentukan berkembang pesatnya ekonomi Islam di sebuah negara adalah semakin banyaknya bank berbasis syariah, banyaknya interaksi investasi atau bentuk kerja sama ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah (seperti *Foreign Direct Investment* atau *Sovereign Wealth Fund*), kebijakan pemerintah yang akomodatif dalam kaitannya dengan menetapkan regulasi perbankan dan produk finansial seperti pengembangan pasar sukuk (*capital market based on sharia*), dan juga sikap masyarakat terhadap bank Islam dan produk-produknya beserta kenaikan tingkat *awareness*-nya dengan eksistensi bank syariah.³

Berkembangnya sistem ekonomi Islam di Inggris pun tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut. Inggris yang memegang teguh konservatisme pasar bebas pada akhirnya membuka diri untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah

² *Loc. Cit*, 3 Desember 2011, 19.05 WIB

³ Diakses dari <http://www.zawya.com/cid214321/why-islamic-economics>, pada tanggal 3 Desember 2011, 19.19 WIB

internasional. Maka rasionalitas ekonomi melihat kondisi ini sebagai alternatif sistem finansial internasional yang menguntungkan.

Mengapa Inggris menjadi aktor yang begitu signifikan dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam secara global? Selain karena Inggris adalah negara Barat pertama yang menerapkan sistem ekonomi Islam ini, kenyataannya data-data menunjukkan bahwa Inggris telah memberikan layanan keuangan Islam selama 20 tahun dan telah berkontribusi besar untuk menjadi pusat penyediaan keuangan Islam di negara-negara Barat. Dukungan kebijakan pemerintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh *Financial Services Authority* (FSA) telah membuat situasi semakin kondusif bagi investor dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong bank-bank Islam beroperasi di Inggris.

Selain itu, berbagai tuntutan (menanggulangi *financial exclusion*⁴) dan dukungan dari berbagai organisasi non-profit muslim seperti *Muslim Council of British*, *Islamic Sharia Council*, dan *Islamic Finance Council* serta kebijakan pemerintah mampu bersinergis dalam membentuk kerangka ekonomi Islam yang kuat di Inggris. Artinya, ada titik temu antara kepentingan kaum muslim minoritas di Inggris yang tereksklusi secara finansial (sebelum 2004) akibat tidak adanya produk perbankan yang sesuai dengan azas-azas Islam, dengan kebijakan pemerintah yang mendukung berdirinya bank Islam pertama di tanah Eropa, yakni IBB.

Pembentukan kerangka fiskal dan peraturan yang memungkinkan ekonomi Islam memasuki Inggris sejak tahun 2004 oleh FSA telah menghasilkan dua keuntungan utama: 1) penghapusan pajak ganda dan perpanjangan keringanan pajak untuk perusahaan serta individu, 2) Reformasi pengaturan utang sesuai hukum Islam. Dengan kebijakan pemerintah Inggris yang akomodatif terhadap keuangan Islam, data menunjukkan bahwa kekuatan utama keuangan Islam di Inggris adalah: 1) Sejak 2008, London menawarkan pasar sekunder sukuk senilai

⁴ *Financial exclusion* adalah terminologi yang menjelaskan kondisi suatu golongan masyarakat yang tereksklusi dari kegiatan ekonomi karena hal yang sangat mendasar, seperti agama dan kemiskinan yang ekstrim. (Selengkapnya Muhammad Hersi, *The role of Islamic finance in tackling financial exclusion in the UK*, Durham University)

5 miliar US\$, 2) Didukung oleh pajak dan regulasi yang kondusif (revisi dan penyesuaian UU Keuangan 2003, 2004, 2005, 2007, dan 2008), 3) Permintaan pasar telah mendorong pertumbuhan produk-produk inovatif seperti produk Islam di sektor properti (*Islamic home financing*), 4) *Islamic Bank of Britain*, yang berkantor pusat di Birmingham telah menyebarluaskan pangsa pasar hingga ke Midlands, Manchester, dan Wales.⁵

Secara global, permintaan layanan ekonomi Islam diperkirakan telah tumbuh lebih dari tiga kali lipat selama dekade terakhir, dari sekitar 150 miliar US\$ pada pertengahan 1990-an menjadi 500 miliar US\$ pada tahun 2006. Hingga tahun 2006, jumlah sukuk meningkat empat kali lipat menjadi 24 miliar US\$, dana ekuitas dan investasi lainnya juga meningkat empat kali lipat menjadi 14 miliar US\$, dan asuransi takaful dua kali lipat menjadi 3 miliar US\$.⁶ Dengan semua faktor tersebut, potensi pertumbuhan jasa keuangan berbasis Islam di Inggris menjadi semakin masif.

Sebanyak 10 bank Islam global seperti Al-Baraka Bank (Bahrain) dan ABC International Bank (Arab Saudi) yang beroperasi di Inggris telah mendirikan kantor cabang untuk menyediakan produk maupun layanan ekonomi Islam di Inggris. Meskipun begitu, penulis menduga bahwa penerapan ekonomi Islam ini sarat dengan kepentingan ekonomi politik Inggris di bidang SWF, FDI, maupun petrodollar terhadap negara-negara GCC (*Gulf Cooperation Council*)⁷ yang kaya akan minyak bumi, bukan hanya upaya Inggris mencari sistem ekonomi alternatif atau pun menyediakan produk finansial terhadap kaum minoritas muslim Inggris.

1.2 Permasalahan

Sejak kemunculan bank Islam pertama di Inggris dan tanah Eropa (2004-2010), yang juga akan menjadi *time frame* penulis dalam penelitian ini, model

⁵ “Issues and Relevance of Islamic Finance in Britain”, diakses dari www.islamic-banking.com/ibanking/ibanking_aom/is_khan.php, pada tanggal 5 Desember 2011, 20.17 WIB

⁶ *Loc. Cit.*, 5 Desember 2011, 20.23 WIB

⁷ GCC (*Gulf Cooperation Council*) adalah aliansi politik dan ekonomi yang beranggotakan 6 negara Teluk (Bahrain, Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar) dan didirikan pada tahun 1981. (Selengkapnya Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*.)

perbankan syariah mampu membuat sistem ekonomi ini semakin populer di skala global karena berbagai keuntungan yang diberikan. Padahal secara filosofi, ekonomi Islam amat sangat bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalisme-liberalisme yang dianut oleh Inggris, cara pandang terhadap bunga/*interest* adalah salah satu bentuk ekstrimnya. Selain itu, sistem ekonomi Islam sangat menekankan kepada *output* berupa keadilan distribusi dan keadilan sosial, dimana masyarakat luas adalah obyek utamanya. Berbeda dengan sistem ekonomi liberalisme yang menekankan kepada kebebasan individu dan privatisasi.

Kenyataannya sekarang ini negara-negara Barat justru berlomba-lomba dalam mengembangkan model perbankan syariah atau sistem ekonomi Islam ini. Berbagai cara ditempuh untuk memuluskan jalan masuk ekonomi Islam atau bank syariah, mulai dari usaha regulasi dan lisensi dari bank sentral, sampai kepada replikasi dan penguatan kelembagaan ekonomi Islam. Perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam di Inggris berkembang sangat cepat dan mampu mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Inggris walaupun penduduk muslim di Inggris adalah kelompok minoritas (sekitar 1,8 juta jiwa). Motivasi dan peluang Inggris dalam perbankan Islam inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti perkembangan sistem ekonomi Islam di salah satu negara maju di Eropa Barat tersebut. Untuk itu, rumusan permasalahan yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Inggris memiliki kepentingan ekonomi politik dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam pada periode 2004-2010?”**

1.3 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan memaparkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memberikan signifikansi pada topik skripsi yang penulis ambil, yakni ekonomi Islam. Secara umum, penulis mengklasifikasikan tinjauan pustaka ini menjadi tiga bagian. Pertama adalah pemaparan penelitian mengenai kehadiran ekonomi Islam dalam konteks dinamika ekonomi politik internasional. Kedua, penelitian mengenai kebijakan pemerintah Inggris yang mengakomodasi ekonomi Islam sebagai ekonomi

alternatif. Ketiga, keuntungan ekonomi yang berpotensi didapatkan negara Barat dari ekonomi syariah. Dengan demikian, saya dapat mengambil kesimpulan di akhir *literature review* kali ini apakah topik yang saya ajukan layak untuk diteliti dan ditulis menjadi skripsi.

1.3.1 Ekonomi Islam dalam Konteks Dinamika Ekonomi Politik Internasional

Kehadiran ekonomi Islam telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam akan sebuah sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus utama perdebatan sebuah sistem ekonomi dunia, terutama sejak usainya Perang Dunia II yang memunculkan banyak negara-negara Islam bekas jajahan imperialis. Dalam hal ini, keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak, muslim maupun non-muslim untuk melakukan banyak penggalian kembali berbagai ajaran Islam, khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antar manusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktivitas lainnya.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.⁸ Pada awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (*fiqh*) maupun bidang ekonomi.

Pada pertengahan 1980-an, keadaan yang menimbulkan perbankan Islam telah meredup. Lebih khusus, pendapatan minyak telah jatuh sedemikian rupa bahwa sebagian besar negara Islam mengalami masalah fiskal dan keseimbangan neraca pembayaran. Di Arab Saudi, misalnya, pendapatan minyak menurun

⁸ Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics and Finance*, (London: Routledge, 1999), hlm. 6

drastis dari 120 miliar US\$ pada tahun 1981 menjadi 17 miliar US\$ pada tahun 1985.⁹

Krisis finansial sering kali memiliki konsekuensi politik dan ekonomi yang dramatis seperti pemotongan anggaran, kenaikan pajak, pemotongan upah tenaga kerja, dll. Namun, perbankan Islam terus berkembang. Fase ini membantu menjelaskan pertumbuhan dalam model ekonomi Islam, yaitu munculnya model baru dalam ranah ekonomi global yang membatasi pilihan pemerintah dan ditandai oleh norma dan ideologi baru. Hal yang dimaksud adalah transformasi sektor keuangan, dimana garis antara perbankan komersial di satu sisi, dan perbankan investasi serta kegiatan keuangan lainnya di sisi lain, semakin kabur.

Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para pelopor bank Islam berpikiran untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang lebih *rigid*.

Dewasa ini, ekonomi Islam telah menjadi pilihan alternatif bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank syariah. Bahkan, di Inggris dan Amerika Serikat juga tumbuh dengan subur sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh perbankan kedua negara tersebut. Maka, penguatan kelembagaan dan sistem ini harus terus diupayakan agar kelak tidak terjadi kesalahan di dalam pelaksanaannya.

Perkembangan ekonomi Islam ini mengandung dua hal yang sangat mendasar. Pertama adalah tumbuhnya ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Kedua, tantangan maupun

⁹ Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh University Press, 2000), hlm. 32

kontestasi nilai ideologis ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalisme.¹⁰

Perbankan syariah dengan produk-produknya yang dikenal, yaitu *Mudharabah, Murabahah, Sukuk, dan Musyarakah* adalah sebuah sistem ekonomi berbasis pada kesepahaman bersama tentang apa yang diserahkan dan apa yang diperoleh oleh seorang nasabah di dalam transaksi ekonomi Islam. Di dalamnya terdapat nilai yang dijadikan sebagai pedoman bersama untuk berkembang dan maju bersama.

1.3.2 Kebijakan Pemerintah Inggris yang Mengakomodasi Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Alternatif dan Bersifat Komplementer

Mohammed Hersi menjabarkan penelitiannya mengenai peranan penting ekonomi Islam dalam menanggulangi fenomena eksklusi finansial yang melanda kaum minoritas muslim di Inggris. Salah satu aspek yang menonjol dalam tulisan tersebut adalah kondisi sosio-ekonomi kaum muslim Inggris yang merasa tidak terakomodasi kegiatan maupun aktivitas ekonominya di Inggris akibat dari minimnya bank berbasis syariah maupun produk perbankan syariah seperti *mudharabah, murabahah, sukuk, dan takaful*.

Kaum muslim yang taat akan hukum syariah Islam tersebut menuntut akan adanya produk keuangan di Inggris yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka dalam aktivitas ekonomi yang dilandasi nilai-nilai keislaman atau syariah. Hal ini didorong oleh hukum Islam yang disebutkan dalam Alquran sebagai kitab suci kaum muslim yang menyebutkan bahwa bunga bank bersifat riba.

Adapun, *time frame* dari penelitian tersebut adalah tahun 1987-2004, dimana pada rentang tahun tersebut Inggris sedang mencari pola baru kebijakan ekonomi yang mampu merangkul kebutuhan dan kepetingan kaum muslim minoritas ini. Artinya, Inggris sedang gencar-gencarnya mempelajari seluk-beluk penerapan sistem ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah.

¹⁰ *Ibid*, hlm 6

Akhir tahun 1980-an adalah era awal masuknya bank berbasis syariah milik Bahrain, yaitu Al-Baraka. Namun, karena minimnya pengetahuan dan praktek mengenai ekonomi syariah di Inggris, bank tersebut gagal menempatkan diri dalam sistem ekonomi Inggris. Sedangkan, pada tahun 2004, Inggris berhasil mendirikan bank syariah pertama di negara non-muslim dengan kemitraan bersama Bahrain, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Disini terlihat keseriusan Inggris untuk mengakomodasi kepentingan kaum muslim minoritas Inggris dan mengembangkan lebih lanjut perbankan syariah.

Dalam ajaran Islam, penerimaan atau pembayaran bunga dilarang dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan, bunga atau *interest* adalah instrumen mendasar dalam dunia perbankan konvensional. Kemudian imbasnya adalah banyak kaum muslim yang memilih untuk tidak menggunakan produk dan jasa bank konvensional ini. Inilah fenomena yang disebut Hersi sebagai eksklusi finansial dan berpotensi menciptakan penghalang lain bagi kaum muslim Inggris untuk mengakses layanan perbankan di masa depan.

Mantan Presiden *Muslim Council of British* (MCB), Anas Al-Tikriti mengatakan bahwa sebuah studi menunjukkan bahwa kaum muslim Inggris tinggal di situasi dan daerah termiskin di antara minoritas agama lainnya di Inggris. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai universitas-universitas seperti Birmingham, Derby, Oxford, dan Warwick menemukan bahwa "terdapat 14% muslim berusia di atas 25 tahun yang menganggur, dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional yaitu 4%".¹¹

Disini terlihat bahwa komunitas muslim Inggris menderita kemiskinan yang sangat kompleks secara sosio-ekonomi. Ini adalah harapan para akademisi dan peneliti bahwa hasil penelitian ini akan berharga untuk semua pihak yang terkait dengan kesulitan yang dihadapi komunitas ini, termasuk penyedia produk jasa keuangan syariah, pembuat kebijakan, dan organisasi muslim itu sendiri.

¹¹ Mohammed Hersi, *The role of Islamic finance in tackling financial exclusion in the UK*, Doctoral thesis, Durham University

Kabar baiknya adalah, hal ini telah mendapatkan pengakuan dari politisi Inggris dan industri keuangan Inggris. Dalam pidatonya di Kamar Dagang dan Industri London pada tanggal 27 Juni 2005, Callum McCarthy, Ketua FSA (*Financial Services Authority*), menyatakan bahwa FSA sangat prihatin tentang *financial exclusion* muslim Inggris yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung dalam kaitannya dengan akses ke layanan keuangan berbasis Islam.

Menurut McCarthy, proses otorisasi dari Bank Islam Inggris (*Islamic Bank of Britain*) sebagai Bank Islam pertama di Eropa adalah salah satu keberhasilan FSA pada tahun 2004 sebagai langkah penting menuju pelayanan jasa keuangan 1,8 juta muslim Inggris dengan produk keuangan yang koheren dengan keimanan mereka.

Konsensus di antara masyarakat Inggris menegaskan bahwa kaum Muslim akan sepenuhnya terlibat dalam sektor jasa keuangan jika produk syariah yang otentik dan kompetitif disediakan untuk mereka. Salah satu tantangannya adalah untuk menetapkan apakah produk keuangan syariah yang saat ini ditawarkan di Inggris telah memenuhi harapan komunitas.

Dari berbagai *literature review* yang telah saya lakukan diatas dapat disimpulkan bahwa topik yang saya ajukan signifikan untuk dijadikan penelitian skripsi sebab topik tersebut unik, belum pernah ada penelitian yang secara khusus membahas ekonomi Islam di dalam strategi ekonomi Inggris, merupakan penelitian lanjutan untuk menganalisa kebijakan Inggris khususnya dalam menunjang perkembangan ekonomi Islam di Inggris khususnya, dan menjadi aktor sentral sebagai pembuka jalan bagi ekonomi Islam ke Eropa bahkan dunia.

1.3.3 Dinamika Ekonomi dan Keuangan Islam di Jerman

Dengan populasi 4 juta muslim di Jerman, dengan perkiraan kekayaan sebesar 25 miliar Euro, Jerman adalah pangsa pasar yang besar bagi ekonomi Islam. Tidak hanya pendapatan bersih rumah tangga kaum muslim diperkirakan akan meningkat lebih lanjut di masa depan, umat Islam juga memiliki tingkat tabungan yang luar biasa, yaitu hampir dua kali lipat rata-rata nasional (18%

dibandingkan 10%). Menurut survei, 94% muslim yang tinggal di Jerman tertarik pada produk ekonomi Islam.¹²

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Muslim di Eropa (2005)

Negara	Penduduk (dalam juta)	Penduduk Muslim (dalam jt)	Persentase
Perancis	61,0	6,10	10%
Inggris	60,0	1,8	3%
Jerman	83,6	3,25	3,89%
Italia	56,0	1,39	2,5%
Spanyol	42,1	0,6	1,43%
Belgia	10,7	0,39	3,65%
Swedia	9,3	0,31	3,33%
Austria	8,5	0,22	2,6%
Denmark	5,6	0,19	3,4%
Siprus	0,95	0,24	25,26%
Turki	72,1	72	99,89%
Swiss	7,8	0,25	3,2%

Sumber: OECD World Fact Book 2005

Meskipun penerbitan sukuk pertama oleh Sachsen-Anhalt pada tahun 2004 terhitung sukses (penerbitan sukuk pertama di luar negara Islam), namun ekonomi Islam masih kurang terwakili di Jerman. Baru-baru ini beberapa bank Jerman mulai menawarkan produk-produk perbankan syariah untuk menangkap peluang pasar. Diantaranya adalah DWS Noor Islamic Funds oleh Deutsche Bank Group, Allianz Global Investors Islamic Fund, dan juga Meridio Islamic Fund. Dalam hal ini situasi Jerman berbeda dari situasi di Inggris, dimana Bank Islam Inggris dan bank lain telah menawarkan produk-produk perbankan Islam untuk kaum muslim Inggris lebih dulu.

Hingga pertengahan 2009, belum ada upaya pemerintah untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yang melaksanakan produk-produk perbankan secara eksklusif berbasis Islam, alasannya sebagai berikut:

1. BaFin memiliki beberapa keraguan tentang kelayakan komersial dari Bank Islam yang menargetkan pelayanan kepada kaum muslim di Jerman. BaFin

¹² OECD World Fact Book, 2008, hlm. 49

menilai bahwa 4 juta populasi muslim Jerman bukanlah pangsa pasar yang kurang menguntungkan atau terlalu *segmented*.

2. UU Perbankan Jerman, secara teknis, belum mendukung perbankan Islam. Sebagai contoh: Undang-Undang Perbankan Jerman mengatur bahwa nilai agregat investasi pada saham dan klaim yang dihasilkan dari kontribusi modal tidak boleh melebihi modal ekuitas bank bertanggung jawab.
3. Ada kekhawatiran mengenai keamanan deposit jika prinsip *profit-loss sharing* diterapkan untuk deposito dalam investasi rekening dengan bank-bank Islam, tidak ada jaminan untuk pelunasan dari jumlah deposit. Sementara itu, ada sebuah paragraf ditambahkan ke UU Perbankan Jerman yang memaksa lembaga kredit untuk tidak berpartisipasi dalam perlindungan deposito.
4. Sistem perbankan Jerman yang terkait dengan pelaporan, audit, dan teknik pemantauan sangat menyimpang dengan jenis institusi atau bank-bank Islam secara substansial.

Meskipun begitu, Deutsche Bank telah membentuk sebuah produk khusus yang menargetkan kepada etnis Turki (Bankamiz) dan beroperasi dengan baik. Pada tahun 2009, *Federal Financial Supervisory Authority/BaFin* (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*) menyelenggarakan konferensi tentang Perbankan Syariah dan beberapa investor menyambut baik untuk memasuki pasar ekonomi syariah Jerman.

Presiden BaFin, Jochen Sanio, secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada hambatan untuk pemberian izin maupun lisensi kepada Bank Islam dan produk mereka di Jerman. Sikap ini disambut dengan baik oleh Kuveyt Turk Participation Bank, yang mayoritas dimiliki oleh Kuwait Finance House, menjadi Bank Islam pertama yang membuka kantor di Mannheim, Jerman pada tahun 2010 dan mulai beroperasi pada tahun 2011.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Definisi Ekonomi Islam dalam Dinamika Ekonomi Politik

Menurut Dr. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah: *branch of knowledge* (cabang ilmu) ekonomi yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya berdasarkan nilai-nilai Islam¹³. Berdasarkan definisi Chapra ini, penulis cenderung memilih menggunakan terminologi ekonomi Islam ketimbang ekonomi syariah. Ekonomi Islam dan ekonomi syariah adalah dua hal yang serupa tetapi tidak sama.

Pembahasan dalam ekonomi syariah cenderung banyak mengarah kepada analisis hukum syariah dalam Islam yang mengatur bagaimana individu atau negara Islam menjalankan kegiatan ekonominya. Sedangkan, terminologi ekonomi Islam lebih mengarah kepada kajian ekonomi-sosial-politik yang mencakup seluruh elemen mendasar dalam kedua cabang ilmu pembentuknya, yakni ekonomi dan Islam.

Sistem ekonomi Islam, secara filosofis, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional pada umumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah ekonomi Islam tidak mengakui adanya bunga (*interest*) dalam aktivitas ekonomi karena bersifat riba, seperti yang dijelaskan dalam sumber utama ekonomi Islam, yakni Al-quran dan Hadis. Penulis menetapkan sektor perbankan sebagai fokus utama dalam melihat perbedaan antara kedua sistem ekonomi ini. Berikut adalah elemen-elemen yang terkandung dalam tiap-tiap perbankan:¹⁴

¹³ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Islamic Foundation, 2007), hlm. 6

¹⁴ “The basic principles of Islamic Economy and their effects on accounting standards-setting” diakses dari <http://www.accountancy.com.pk/articles.asp?id=10>, pada tanggal 25 Februari 2012, 21.03 WIB

Tabel 1.2 Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional

Elemen	Konvensional	Islam
Pendekatan Ekonomi	Mikro	Makro
Pengguna Utama	Investor dan Kreditor	<i>State, Management, People</i>
Kebijakan Akuntansi	<i>Goal Oriented</i>	<i>Value Oriented</i>
Valuasi Aset	Historical Cost Price	Current Exit Price
Income Determination	Pendekatan <i>Revenue-Expense</i>	Pendekatan <i>Asset-Liability</i>
<i>Time Value Money</i>	Ya	Tidak
Time Period	Ya	Ya
Fokus Utama	<i>Income Statement</i>	<i>Balance Sheet</i>
Konsep Teoritis	<i>Entity Theory</i>	<i>Proprietary Theory</i>
Fundamental	Berdasarkan <i>Income</i>	Berdasarkan Hukum Islam
<i>Fixed Interest</i>	Ya	Tidak
Orientasi Legalistik	Hukum Konvensional	Hukum Islam
Peraturan Akuntansi	Teknis	Etika
Pasar Modal	Ya	Ya
<i>Dichotomy of Business</i>	Ya	Tidak
Moralitas	Tidak	Ya

Sumber: Munawar Iqbal dan David Llewellyn, 2010

Menurut buku *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Risk*¹⁵, bank Islam adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah. Dua faktor determinan yang menjadi fokus utama perbankan Islam adalah kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Maka, disini perbankan Islam bukan ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan bisnis semata seperti dalam sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial-ekonomi bagi pelaku ekonomi yang memakai produk bank Islam. Ciri utama bank Islam adalah sebagai berikut:

¹⁵ Munawar Iqbal dan David Llewellyn, *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Risk*, (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2002), hlm. 10

1. Adanya dewan syariah yang bertugas mengawasi bank dari sudut pandang Islam/syariah
2. Bank Islam selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqih
3. Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian
4. Dalam bank Islam, hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak antara investor pemilik dana dengan investor pengelola dana dan melakukan kerjasama yang menghasilkan *mutual investment relationship*. Dengan demikian, hubungan eskploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya, dapat dihindarkan.
5. Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank Islam yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif, seperti 1) larangan menumpuk harta benda yang berlebihan, 2) menciptakan perekonomian yang adil (konsep usaha bagi hasil dan bagi resiko), 3) serta menjunjung tinggi moral.
6. Kegiatan usaha bank islam lebih variatif dibanding bank konvensional, yaitu sistem bagi hasil, sistem jual beli, sistem sewa beli, serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan Ekonomi Islam baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global. Berbagai pusat studi maupun program pendidikan ditawarkan di berbagai kampus favorit dunia untuk membentuk sumber daya insani di bidang ekonomi syariah. Demikian juga lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah, yang digali dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang selaras dengan ajaran Islam, bermunculan sejak 1970-an yang terus berkembang pesat sampai hari ini.

Robert Heibroner mengatakan, beberapa pakar ekonomi dunia mulai menyadari bahwa mereka telah membangun suatu bangunan yang canggih di atas landasan sempit yang rapuh, yakni kapitalisme.¹⁶ Perekonomian modern telah gagal memastikan keadilan distributif, pertumbuhan berkelanjutan, pembangunan manusia yang seimbang, serta keharmonisan sosial untuk masyarakat luas. Masalah-masalah ini dihadapi di dalam negeri maupun luar negeri dengan acaman resesi berkepanjangan, angka pengangguran yang tinggi, ancaman kondisi moneter yang tidak terkendali, hutang dalam negeri dan luar negeri yang “menggunung”, dan terwujudnya kesenjangan pendapatan secara ekstrim antara lapisan masyarakat.

Satu hal yang harus disoroti adalah peranan pasar uang Islam yang bertindak sebagai *platform* untuk menyediakan pendanaan jangka pendek dan investasi. Instrumen keuangan dan investasi antar bank akan memungkinkan bank Islam untuk menyalurkan dana-dana ke bank yang defisit, sehingga mempertahankan mekanisme pendanaan yang diperlukan untuk mempromosikan stabilitas dalam sistem ekonomi Islam. Pasar uang Islam juga akan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan moneter oleh negara.

Sistem ekonomi Islam juga perlu menyertakan pasar modal untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan, serta menciptakan instrumen ekonomi Islam yang lebih beragam untuk para investor. Pasar ekuitas dan obligasi akan membuat alokasi sumber daya keuangan dan ekonomi lebih seimbang. Hal ini akan mengakibatkan distribusi manajemen risiko yang lebih efisien dalam sistem, sehingga menciptakan stabilitas.

Pasar ekuitas dan obligasi juga akan memberikan jalan untuk meningkatkan modal jangka panjang. Dengan spektrum instrumen di pasar yang luas, *fund manager* akan mampu mengelola portofolio mereka lebih baik dan menyebar risiko mereka sesuai dengan toleransi risiko yang diinginkan, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas yang lebih besar.

¹⁶ Hans Visser, *Islamic Finance: Principles and Practice*, (UK: MPG Books, 2009), hlm. 45

Dari rentang waktu 2004-2010, sistem ekonomi dan keuangan Islam cukup berhasil diterapkan oleh pemerintah Inggris. Terbukti dari awal berdirinya IBB (*Islamic Bank of Britain*) pada tahun 2004 dan kemudahan proses regulasi dari FSA (*Financial Services Authority*), sistem ekonomi Islam dan perbankan syariah semakin berkembang pesat di Inggris. Hal ini ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional yang masuk ke Inggris (ABC International Bank Bahrain, Ahli United Bank, Barclays Capital, Halal Financial Services, Bank Sepah Iran, ABCIB Asset Management Saudi Arabia dan Islamic Mortgages) dan bank konvensional Inggris yang memiliki cabang khusus syariah (HSBC Amanah dan Standard Chartered).¹⁷ Keberadaan bank internasional tersebut dapat dipahami sebagai investor dan mitra yang tertarik dengan pasar keuangan dan jasa yang berbasis syariah di Inggris.

Tantangan dalam industri perbankan Islam adalah, mengarahkan perkembangan sistem ekonomi Islam menjadi lebih dinamis dan responsif ketimbang sistem keuangan konvensional. Pengembangan Sistem ekonomi Islam harus mencakup komponen kunci yang terdiri dari pasar uang Islam atau pasar modal Islam, penerapan syariah yang kuat, dan juga sinergi antar komponen dalam sistem tersebut.

1.4.2 Sovereign Wealth Fund

Sovereign wealth fund (SWF) atau dana kekayaan negara adalah instrumen keuangan internasional yang dimiliki negara untuk menginvestasikan sejumlah uangnya di negara lain. Menurut Ian Bremmer, SWF adalah instrumen negara yang dipilih dalam alur mekanisme kapitalisme negara (*state capitalism*).¹⁸ Bagi Bremmer, SWF digunakan oleh negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi politik di negara maupun kawasan lain untuk menimbun dana kekayaannya.

¹⁷ Diakses dari <http://investinuk.net/uk-business-potentials-2011>, pada tanggal 2 Maret 2012, 16.15 WIB

¹⁸ Christopher Balding, *A Portfolio Analysis of Sovereign wealth Funds*, (University of California Press, 2008), hlm. 3

Banyak definisi yang telah diusulkan oleh berbagai institusi keuangan internasional maupun ekonom untuk SWF. Namun penulis cenderung menggunakan definisi SWF menurut IMF, yakni SWF adalah kumpulan modal atau dana yang dikendalikan oleh pemerintah atau badan pemerintah terkait yang melakukan investasi terhadap aset negara lain untuk mencari keuntungan di atas *free rate of return*.¹⁹

Dengan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa negara menggunakan SWF sebagai alat untuk diversifikasi ekonomi dan meningkatkan *human capital*. SWF secara eksplisit maupun implisit bertujuan untuk melakukan investasi dalam ekonomi domestik atau regional. SWF memiliki berbagai bentuk termasuk cadangan devisa, dana stabilisasi, dana pembangunan, dan badan usaha milik negara.

Negara dapat menggunakan SWF untuk melakukan investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan sementara yang lain menggunakan SWF untuk membuat lorong spesialisasi ekonomi, misalnya dalam jasa keuangan. Negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Qatar dengan SWF yang besar mengkhususkan kota-kota mereka untuk menjadi pusat layanan keuangan internasional, dengan harapan investasi akan terus masuk ke negara mereka.

SWF juga telah semakin *professionalized*, terlihat dari peningkatan kualitas manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Ada banyak alasan untuk melakukannya, tetapi negara tidak akan “memarkir” modal keuangan aset mereka untuk mendapatkan pengembalian riil negatif di pasar luar negeri.

SWF biasanya berasal dari pendapatan sumber daya alam. Kuwait, Uni Emirat Arab, Norwegia, Arab Saudi, Rusia, Cili, dan Oman adalah kelompok negara yang menyalurkan dana dari royalti sumber daya alam ke dalam SWF. Selain itu, negara-negara dengan cadangan sumber daya alam yang minim seperti Singapura dan Cina mendapatkan basis modal dari surplus fiskal dan akumulasi cadangan asing.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3

Awalnya dana tersebut digunakan sebagai dana stabilisasi untuk mengurangi *boom and bust*, atau kecenderungan ekonomi yang tergantung kepada komoditas tertentu, kemudian negara menciptakan aturan yang jelas mengenai dana tabungan, strategi investasi, dan skenario di mana pemerintah dapat mengakses modal mereka untuk keluar dari kemerosotan ekonomi.

Dalam upaya untuk menghindari siklus *boom and bust*, mensterilkan arus masuk mata uang asing, konsumsi jangka panjang, serta meningkatkan kembali cadangan devisa, negara menciptakan SWF untuk mengelola kepemilikan mereka. Terutama disebabkan oleh tingginya harga komoditas, SWF diperkirakan menguasai aset lebih dari 3 miliar US\$ dan diprediksi akan naik ke 12-15 miliar US\$ pada tahun 2015.²⁰

Mantan Menteri Keuangan AS, Larry Summers, menjelaskan argumennya kepada *Financial Times*: “Logika sistem kapitalis yang tergantung pada pemegang saham menyebabkan perusahaan untuk memaksimalkan nilai saham mereka. Jelas bahwa hal ini dari waktu ke waktu akan menjadi motivasi pemerintah untuk mengakumulasi pemegang saham. Mereka ingin melihat perusahaan nasional mampu bersaing secara efektif, atau mengadakan kontestasi perusahaan nasional dengan kehadiran SWF secara positif.”²¹

Banyak ekonom berpendapat bahwa tanpa adanya peraturan yang tepat mengenai SWF, negara-negara yang menerapkan SWF akan dengan mudah mendapatkan akses ke rahasia keamanan nasional, mengganggu stabilitas politik, atau mengacaukan pasar keuangan internasional. Organisasi internasional, pemerintah nasional, dan peneliti harus duduk bersama untuk merumuskan kebijakan mengenai tata cara dan ketentuan SWF.”²²

Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada SWF karena dua alasan. Pertama, pemerintah terkait melakukan investasi dalam skala besar. Kalangan ekonom dan akademisi khawatir bahwa pemerintah dapat

²⁰ *Ibid*, hlm. 4

²¹ *Ibid*, hlm. 4

²² *Ibid*, hlm. 5

melakukan investasi bermotif politik yang dirancang untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan bukan untuk kegiatan ekonomi.²³ Kedua, status SWF sangat *classified*. Untuk kedua alasan ekonomi dan politik, SWF mirip dengan bank investasi dan *hedge fund* dalam hal informasi yang jelas tentang keputusan investasi mereka.

Akibatnya, kalangan ekonom dan akademisi bertanya-tanya tentang tujuan dan kegiatan negara-negara melakukan SWF. Mereka menilai bahwa SWF, cepat atau lambat, akan mengancam stabilitas sistem keuangan internasional di bawah skenario *derivative traders* yang minim pengawasan atau pada titik ekstrem, berpotensi menghancurkan suatu perusahaan untuk tujuan politik. Dengan kata lain, kekhawatiran terhadap SWF timbul dari kekhawatiran seputar manajemen politik dana besar dan dampaknya terhadap investasi lintas batas (*cross border investment*).

1.4.3 *Foreign Direct Investment*²⁴

Perusahaan multinasional/*Multinational corporations* (MNC) umumnya memanfaatkan peluang bisnis asing dengan terlibat dalam *Foreign Direct Investment* (FDI), yaitu investasi dalam aset (seperti tanah, jasa keuangan, bangunan, atau bahkan tanaman) yang ada di luar negeri. Mereka terlibat dalam usaha dengan perusahaan asing, memperoleh perusahaan asing, atau membentuk anak perusahaan asing baru. Setiap jenis FDI dapat menghasilkan surplus atau *revenue* yang tinggi ketika dikelola dengan baik.

Mengingat karakteristik manajemen dan risiko dari FDI, perusahaan multinasional cenderung berhati-hati dalam menganalisis manfaat dan biaya sebelum menerapkan semua jenis FDI. Disini peranan pembuat kebijakan atau *decision maker* sangat sentral dalam memahami potensi dan risiko yang terkait dengan FDI sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang memaksimalkan nilai MNC. Berikut ini adalah motif khas dari perusahaan

²³ *Ibid*, hlm. 6

²⁴ Diakses dari <http://www.economywatch.com/foreign-direct-investment/policies.html>, pada tanggal 2 Maret 2012, 20.20 WIB

multinasional yang berusaha untuk meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin (*profit-maximalization*):

1. Menarik sumber-sumber permintaan baru atau ekspansi pasar. Sebuah perusahaan sering mencapai tahap ini ketika pertumbuhan cenderung stagnan di negara asalnya, dikarenakan persaingan yang ketat. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertimbangkan pasar asing di mana potensi permintaan masih terbuka lebar. Banyak negara berkembang, seperti Argentina, Cili, Meksiko, dan Hungaria yang dianggap sebagai sumber yang menarik dari permintaan baru. Banyak pula perusahaan multinasional telah menembus negara-negara ini sejak hambatan-hambatan investasi dan perdagangan dihapuskan. Konsumen di beberapa negara secara historis telah dibatasi dari pembelian barang yang diproduksi oleh perusahaan di luar negara mereka, pasar untuk beberapa barang menjadi tidak mapan dan menawarkan banyak potensi untuk penetrasi oleh perusahaan multinasional. Jika perusahaan lain dalam industri telah membuktikan bahwa keuntungan dapat dimaksimalkan di pasar lain, sebuah MNC juga dapat memutuskan untuk menjual di pasar tersebut.
2. Peluang untuk monopoli. Perusahaan dapat melakukan internasionalisasi jika mereka memiliki sumber daya atau tidak tersedianya persaingan pasar.
3. Mengurangi hambatan perdagangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan multinasional menggunakan FDI sebagai aksi defensif, bukan strategi agresif. Dengan kata lain, perusahaan multinasional dapat mengejar FDI untuk menghindari hambatan perdagangan.
4. Diversifikasi internasional. Karena perekonomian negara-negara tidak bergerak sempurna dari waktu ke waktu, arus kas bersih dari penjualan produk antar negara harus lebih stabil daripada penjualan yang sebanding dalam satu negara. Dengan melakukan diversifikasi penjualan (dan bahkan mungkin produksi) secara internasional, sebuah perusahaan dapat membuat arus dana yang kurang stabil. Selain itu, perusahaan dapat menikmati biaya yang lebih rendah sebagai pemegang saham dan kreditur menganggap risiko MNC lebih rendah sebagai akibat dari arus kas yang lebih stabil.

Dengan kata lain, FDI adalah berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh berbagai negara untuk mengatur investasi luar negeri mereka. Kebijakan ini memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan investor asing. Mereka biasanya dipengaruhi oleh FDI yang berada di suatu negara dan membuat keputusan berdasarkan kebijakan tersebut. Jika kebijakan tersebut cocok dan menguntungkan bagi perusahaan mereka, maka korporasi akan berinvestasi di negara tersebut.

Kebijakan FDI juga dapat diformulasikan untuk mempromosikan negara tersebut sebagai tujuan investasi utama. Hal ini mengindikasikan bahwa, ada tujuan tertentu di balik kebijakan FDI. Para pembuat kebijakan ini memiliki dua tujuan yang luas, yaitu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada dengan investor luar negeri, serta menciptakan keseimbangan antara investor asing dan lokal. Kebijakan ini juga memiliki berbagai proposal yang dibuat dalam rangka mengelola FDI. Proposal ini penting dalam meningkatkan situasi kebijakan FDI sehingga suatu negara dapat menarik para investor luar negeri. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan FDI yang datang ke negara tersebut.

Negara-negara tertentu memiliki kebijakan yang berbeda mengenai FDI. Meskipun begitu, mayoritas negara-negara yang akan menerima FDI memberikan kondisi di mana perusahaan tertentu harus meminta izin dari otoritas keuangan untuk proses legitimasi. Berbagai pilihan di mana seorang investor luar negeri dapat memasuki pasar suatu negara untuk tujuan FDI juga perlu disebutkan dalam kebijakan-kebijakan FDI.

Adapun, kerangka mengenai FDI ini akan penulis gunakan untuk meneropong keterkaitan kepentingan Inggris menerapkan perbankan syariah dengan investasi besar-besaran dari Timur Tengah yang masuk ke dalam sektor jasa dan finansial.

1.4.4 Petrodollar

Seiring dengan melambungnya harga minyak mentah global, aktivitas keuangan di negara-negara kaya minyak di Timur Tengah juga terus

meningkat. Latar belakang ini berjalan beriringan dengan fakta bahwa ekonomi Islam telah menyebar secara luas dan mulai mendapat perhatian lebih di dunia internasional. Di titik ini, ada persinggungan antara dinamika petrodollar dan perkembangan ekonomi Islam dalam ranah ekonomi politik global.

Istilah petrodollar pertama kali digunakan ketika terjadi peristiwa *oil boom* di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi. Peristiwa bersejarah *oil boom* pada tahun 1979 membawa surplus yang besar untuk negara penghasil minyak di Timur Tengah dan dana yang didaur ulang dalam bentuk investasi berupa aset keuangan internasional disebut sebagai petrodollar.²⁵

Konsep ekonomi Islam modern juga muncul selama periode ini. Pada tahun 1979, Bahrain Islamic Bank didirikan sebagai bank Islam pertama di Bahrain, dan memainkan peran perintis sebagai pasar ekonomi Islam internasional di negara-negara Teluk. Pengembangan lebih lanjut datang pada tahun 1983 ketika UU Perbankan Syariah disahkan dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) didirikan di Malaysia.

Dewasa ini, Malaysia telah melampaui Bahrain pada skala pasar untuk layanan atau produk ekonomi Islam. Di sini, gambaran singkat mengenai petrodollar disajikan, karena mereka berhubungan erat dengan evolusi ekonomi Islam. Petrodollar didefinisikan sebagai surplus mata uang asing yang dihasilkan dari penjualan minyak oleh negara-negara penghasil minyak. Karena tidak ada data statistik yang memadai mengenai definisi ini, skala aset petrodollar hanyalah perkiraan.²⁶

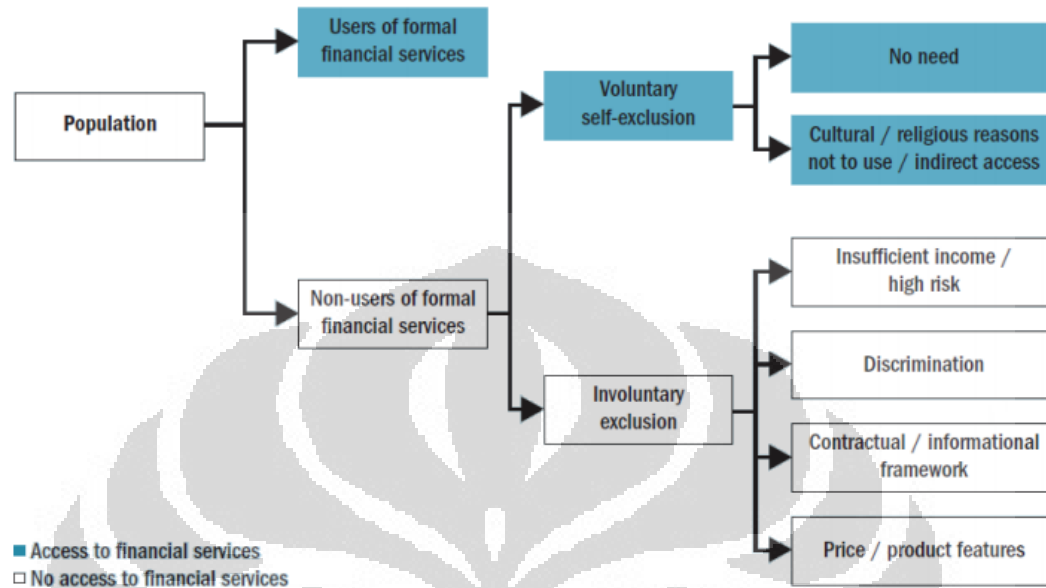
1.4.5 Financial Exclusion

Financial exclusion didefinisikan sebagai kesulitan, ketidakmampuan, atau keengganan kelompok-kelompok tertentu untuk mengakses produk keuangan

²⁵ Daniela Erler, *Islamic Finance: Complement or Substitute? An Empirical Analysis*, (Middlebury College. 2009), hlm. 2

²⁶ *Ibid*, hlm. 4

konvensional.²⁷ Faktor-faktor yang membentuk *financial exclusions* terangkum dalam grafik berikut:



Grafik 1.3 Faktor-Faktor *Financial Exclusions*

Sumber: The World Bank, *Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*, (Washington: 2009)

Dari grafik diatas, kondisi kaum minoritas muslim Inggris tergolong dalam *involuntary exclusions* (lihat grafik 1.3), karena adanya diskriminasi terhadap mereka dengan tidak adanya layanan keuangan syariah (hukum Islam yang melarang adanya bunga/*interest* dalam transaksi keuangan atau perbankan) di Inggris. Sebagai jawaban maupun upaya untuk mencegah *financial exclusion*, pada awal tahun 2000, pemerintah Inggris dan bank sentral mulai menyiapkan konnsep yang bernama *financial inclusions*. Konsep ini mengacu kepada penyampaian jasa keuangan kepada lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan konvensional, dengan kata lain, *financial inclusions* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk

²⁷ Lavinia Mitton, *Financial Inclusions in the UK*, (Joseph Rowntree Foundation, 2009), hlm. 10

memerangi *financial exclusions*.²⁸ Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Inggris adalah mendirikan *Islamic Bank of Britain* pertama pada tahun 2004.

Selama dekade terakhir, konsep *financial inclusion* telah berkembang menjadi empat dimensi: 1) akses mudah untuk membiayai semua rumah tangga dan perusahaan, 2) lembaga keuangan dipandu oleh peraturan prudensial dan pengawasan, 3) keberlanjutan keuangan dan kelembagaan, dan 4) kompetisi antara penyedia layanan untuk memberikan pembiayaan alternatif kepada pelanggan.²⁹

Secara tradisional, *financial inclusion* ekonomi diukur dari proporsi populasi yang dicakup oleh cabang bank umum dan ATM, ukuran deposito dan pinjaman yang dibuat oleh rumah tangga berpendapatan rendah dan UKM (Unit Kecil Menengah). Namun, ketersediaan layanan keuangan konvensional bukan merupakan jawaban absolut untuk *financial inclusion*, karena sebagian orang tereksklusi dari layanan keuangan untuk alasan agama atau budaya, meskipun mereka memiliki akses terhadap layanan keuangan.³⁰ Secara umum, para pengguna jasa keuangan dapat dibedakan menjadi dua: kelompok yang tidak dapat mengakses sistem keuangan karena kemiskinan atau berpenghasilan rendah atau 2) memilih keluar dari sistem keuangan untuk beberapa alasan spesifik, seperti agama dan budaya.³¹

Sistem ekonomi dan keuangan Islam memberikan kontribusi terhadap isu *financial inclusions* dari dua arah, yaitu 1) melalui promosi pembagian risiko kontrak yang memberikan alternatif untuk pembiayaan konvensional yang berbasis utang dan 2) sebagai instrumen spesifik dari redistribusi kekayaan di kalangan masyarakat.³² Kedua instrumen pembiayaan pembagian risiko dan instrumen redistributif seperti *zakat*, *shadaqah*, dan *wakaf* melengkapi satu sama

²⁸ *Ibid*, hlm. 11

²⁹ Mahmoud Mohieldin, Zamir Iqbal, Ahmed Rostom and Xiaochen Fu, *The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion*, (Qatar: 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, 2009), hlm. 6

³⁰ *Ibid*, hlm. 7-8

³¹ *Op. Cit*, Lavinia Mitton, *Financial Inclusions in the UK*, hlm. 14

³² *Ibid*, hlm. 9

lain dan menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk memberantas kemiskinan dan membangun aktivitas ekonomi yang sehat bagi populasi pada khususnya, dan negara pada umumnya. Instrumen yang ditawarkan oleh keuangan Islam memiliki akar sejarah yang kuat dan telah diterapkan di berbagai masyarakat Muslim di dunia.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mengidentifikasi apa yang membuat Inggris menerapkan perbankan syariah sehingga meningkatkan investasi yang masuk dari Timur Tengah. Penelitian ini bersifat eksplanatif yang berupaya memberikan penjelasan terhadap sebuah kasus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode yang digunakan adalah kualitatif yang berusaha menjelaskan fenomena dari suatu kondisi yang sedang berkembang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel baik di media cetak maupun elektronik, dan laporan (*report*) dari lembaga resmi pemerintah maupun non-pemerintah.

1.6 Asumsi

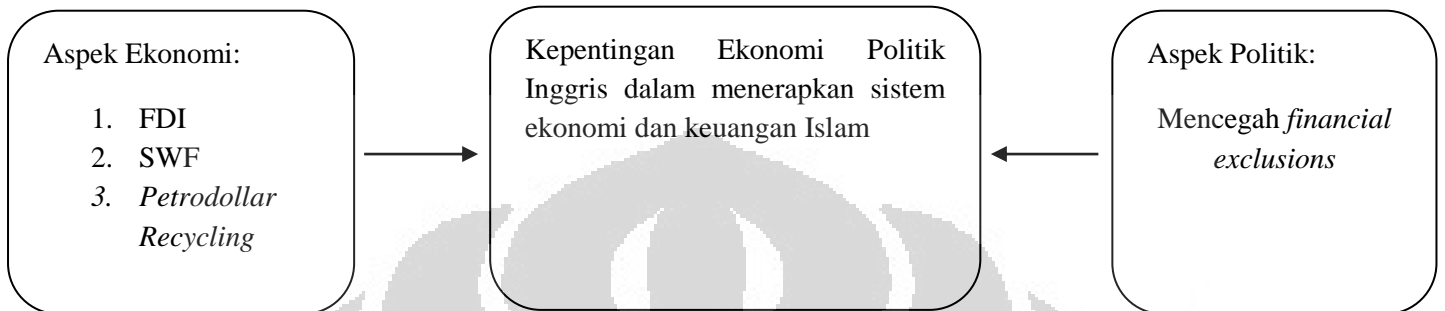
1. Ekonomi dan keuangan Islam adalah sistem ekonomi alternatif yang bersifat komplementer.
2. Usaha Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam terkait dengan penarikan investasi dari negara-negara Timur Tengah.

1.7 Hipotesis

1. Kebijakan pemerintah Inggris memberikan kemudahan bagi perkembangan sektor perbankan Islam dan menarik SWF, FDI, maupun Petrodolar dari negara-negara Timur Tengah.
2. Motivasi Inggris dalam mengembangkan ekonomi Islam terkait dengan kepentingan ekonomi politik sebagai negara Barat pertama

yang menerapkan perbankan syariah dan mengukuhkan posisinya sebagai *economic hub* antara dunia Barat dan Timur Tengah.

1.8 Model Analisis



1.9 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penyebab berkembang pesatnya sistem ekonomi Islam di Inggris, yang notabene bukanlah negara Islam maupun bukan negara dengan penduduk mayoritas Islam, sedangkan ekonomi Islam adalah produk dari agama Islam itu sendiri. Menjamurnya aplikasi sistem ekonomi Islam di berbagai negara karena dianggap membawa keuntungan tersendiri ketimbang sistem ekonomi konvensional adalah salah satu *trigger* penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis juga ingin menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam ini dapat menjadi sistem ekonomi baru yang mampu mengisi friksi atau kekurangan dari paham ekonomi kapitalisme yang rapuh.

Signifikansi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi alternatif kepada kajian ekonomi politik internasional. Penulis berusaha untuk mengungkap bahwa sistem ekonomi Islam ini sedang tumbuh positif untuk menggapai posisi penting dalam ekonomi politik internasional. Terbukti tren positif yang ditunjukkan berbagai negara di dunia dengan aplikasi sistem ekonomi Islam ini di negara masing-masing.

1.10 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I merupakan Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penelitian.
2. Bab II akan membahas mengenai data-data kebijakan ekonomi Inggris yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi dan keuangan Islam seperti FDI, SWF, dan petrodolar dari Timur Tengah sejak tahun 2004-2010 dan aspek ekonomi politik untuk menganalisis perkembangan sistem ekonomi Islam di Inggris.
3. Bab III akan menganalisis keterkaitan aspek ekonomi dan politik untuk melihat penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam (khususnya perbankan Islam) di Inggris untuk melihat indikasi maupun kemungkinan jawaban dari pertanyaan permasalahan penelitian.
4. Bab IV merupakan Penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian dan saran terhadap permasalahan.

BAB 2

DINAMIKA SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI INGGRIS

2.1 Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam di Inggris

Pengalaman pertama perbankan Islam di era modern dimulai di kawasan Timur Tengah pada dekade 1960-an. Oleh karena itu, industri ini terhitung masih relatif muda jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun, dari volume yang kecil dan ‘umur’ yang muda, ukuran industri ini terus berkembang pesat dan sekarang ini diperkirakan ada sekitar 300 lembaga keuangan di seluruh dunia yang menawarkan produk-produk ekonomi dan keuangan Islam.³³ Tidak mengherankan jika pertumbuhan industri ini secara global telah mempengaruhi pasar Inggris.

Gelombang pertama *booming* pendapatan minyak di era 1970-an dan akumulasi petrodolar memberikan momentum kepada pertumbuhan ekonomi dan keuangan Islam yang bertepatan dengan surplus modal asing dari negara-negara pengekspor minyak Timur Tengah. Di era tersebut, bank-bank kecil komersial mulai bermunculan untuk bersaing mendapatkan dana surplus (*surplus funds*). Pada saat yang sama, para ekonom konvensional mulai melakukan pembentukan kerangka teoritis dan penelitian untuk memahami fungsi sistem ekonomi dan perbankan tanpa bunga/*interest*. Bank syariah komersial pertama didirikan pada tahun 1974 di Uni Emirat Arab, diikuti dengan pembentukan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975.³⁴

Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Minsky berpendapat bahwa sistem tersebut secara inheren rentan terhadap ketidakstabilan karena akan selalu ada *maturity mismatch* antara *liabilities* (deposito jangka pendek) dan aset (investasi

³³ Michael Ainley, Ali Mashayekhi, Robert Hicks, Arshadur Rahman dan Ali Ravalia, “The Development of Islamic Finance in the UK” dalam *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investment*, (London: GMB Publishing, 2008), hlm. 9

³⁴ Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Risk Analysis on Islamic Banking*, (Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2008), hlm. 10

jangka panjang). Saat *maturity mismatch* menjadi masalah, bank akan berusaha untuk mengelola *liabilities* dengan menawarkan suku bunga yang lebih tinggi untuk menarik deposito.³⁵ Selalu ada kemungkinan bahwa proses ini tidak berkelanjutan tetapi akan mengikis kepercayaan diri dan menyebabkan pelarian dana dari bank Islam. Oleh karena itu, sistem ini membutuhkan *lender of last resort*, proses restrukturisasi, dan prosedur restrukturisasi utang yang mapan.

Pada awal 1990-an, sistem ekonomi dan keuangan Islam tidak hanya mapan secara teoritis, tetapi berkembang dengan pesat. Tahun 1980-an terbukti menjadi awal dari sebuah periode pertumbuhan yang cepat dan ekspansi industri jasa keuangan Islam. Perkembangan utama dari 1980-an termasuk kelanjutan dari penelitian yang serius di tingkat konseptual dan teoritis, perlindungan konstitusional di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, serta keterlibatan bank konvensional dalam menawarkan layanan syariah.

Republik Islam Iran, Pakistan, dan Sudan mengumumkan niat mereka untuk membuat sistem keuangan mereka sesuai dengan syariah. Negara-negara lain seperti Bahrain dan Malaysia memperkenalkan perbankan Islam dalam kerangka internasional. *International Monetary Fund* (IMF) memulai penelitian dalam memahami implikasi ekonomi makro dari suatu sistem ekonomi yang beroperasi tanpa konsep bunga. Penelitian serupa dilakukan untuk memahami isu-isu seperti keuntungan dan kerugian kontrak bagi-hasil (*profit-loss sharing*) dan stabilitas keuangan sistem tersebut.

Selama awal perkembangan pasar keuangan Islam pada 1980-an, bank-bank Islam menghadapi kelangkaan peluang investasi yang menciptakan peluang bisnis bagi bank konvensional Barat untuk bertindak sebagai perantara/intermediasi, kemudian mengerahkan dana bank syariah sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh bank syariah. Secara bertahap, bank-bank konvensional Barat mengakui pentingnya pasar keuangan Islam dan mulai menawarkan produk Islam melalui *Islamic window* dalam upaya untuk menarik klien secara langsung.

³⁵ *Ibid*, hlm. 12-13

Islamic window bukanlah lembaga keuangan independen, melainkan divisi khusus dalam lembaga-lembaga keuangan konvensional yang menawarkan produk syariah. Sementara itu, karena tingginya permintaan untuk produk syariah, bank konvensional non-Barat juga mulai menawarkan *Islamic window*. Secara umum, *Islamic window* ditargetkan pada tinggi kekayaan bersih individu yang ingin berlatih perbankan Islam: sekitar 1-2 persen dari populasi Muslim dunia.³⁶

Jumlah bank konvensional yang menawarkan *Islamic window* terus berkembang, karena beberapa bank konvensional terkemuka, seperti *Hong Kong and Shanghai Banking Corporation* (HSBC), adalah mengejar pasar ini sangat agresif. HSBC memiliki jaringan mapan bank di dunia Muslim dan, pada tahun 1998, HSBC meluncurkan Global Finance Islam dengan tujuan mempromosikan sekuritisasi aset, ekuitas swasta, dan perbankan Islam di negara-negara industri. Bank-bank Barat yang membuka *Islamic window* antara lain: ABN Amro, American Express Bank, ANZ Grindlays, BNP Paribas-, Citicorp Group, dan Union Bank of Switzerland (UBS). Ada pun bank non-Barat yang turut mengembangkan *Islamic window* adalah United Bank of Kuwait dan Riyadh Bank. Selain itu, Citibank adalah bank konvensional pertama yang melakukan ekspansi di Timur Tengah. Hal ini ditandai dengan *Citi Islamic Investment Bank* (Bahrain) pada tahun 1996.³⁷

Keberadaan transaksi Islam atau kegiatan finansial Islam sudah berkembang di Inggris sejak tahun 1980-an. Transaksi komoditas dengan jenis murabahah³⁸ melalui London Stock Exchange (LSE) sudah mulai digunakan walaupun jumlahnya masih tergolong minim. Tujuan dari kegiatan ekonomi ini antara lain adalah memberikan likuiditas kepada lembaga keuangan dari Timur Tengah dan investor lainnya. Dengan kata lain, kaum muslim minoritas di Inggris masih belum menjadi fokus utama dari kegiatan ekonomi Islam ini.

³⁶ *Ibid*, hlm. 16

³⁷ *Ibid*, hlm. 20

³⁸ *Murabahah* adalah kesepakatan penjualan barang dengan kondisi *profit mark-up* dalam menentukan harga (bagi-hasil). Selengkapnya, HSBC Amanah, *Islamic Finance: Glossary of Terms and Contracts*.

Percobaan produk perbankan syariah di Inggris pertama kali ditawarkan pada era 1990-an, meskipun dengan jumlah yang masih terbatas. Beberapa bank dari Timur Tengah mulai menawarkan produk sederhana seperti *home financing*.³⁹ Namun, dibandingkan dengan produk bank konvensional Inggris, harga produk syariah umumnya tidak kompetitif. Sehingga kaum muslim Inggris masih kesulitan untuk mengakses atau pun menggunakan jasa perbankan syariah pada era tersebut.

Pertengahan tahun 2004, merupakan tahun awal kebangkitan Inggris dalam menerapkan ekonomi Islam (khususnya di sektor perbankan) di negaranya dengan didirikannya IBB. Masyarakat muslim Inggris pun menyambut baik kehadiran bank Islam di negaranya. Bank ini dipimpin oleh seorang presiden direktur bernama Abdul Rahman Abdul Malik yang juga merupakan mantan pemimpin di Abu Dhabi Islamic Bank. Terbentuknya bank ini merupakan hasil kerja sama *Islamic Joint Venture Partnership* (IJVP) dengan kepemilikan saham yang didominasi oleh saham perseorangan, yaitu dari Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.⁴⁰ Izin operasi dan lisensi diperoleh langsung dari FSA.

Salah satu yang turut menyambut baik lahirnya IBB ini adalah Presiden *Islamic Finance Council* (IFC), yaitu Iqbal Asaria. Beliau mengatakan bahwa peluncuran bank berbasis Islam ini merupakan suatu momentum baru dalam sejarah keuangan dan bisnis Islam di Inggris. Menurut Iqbal, “beroperasinya bank Islam Inggris akan menandai peluncuran produk-produk syariah murni yang harus dipatuhi komunitas muslim Inggris”.⁴¹

Sebenarnya, sebelum kelahiran bank Islam di Inggris, masyarakat Inggris telah mengakses layanan perbankan Islam dari beberapa bank konvensional yang membuka unit syariah atau divisi syariah. Akan tetapi, ketersediaan divisi syariah (*Islamic window*) di bank-bank tersebut ternyata belum mampu mengakomodasi banyak keinginan nasabah Muslim di Inggris. Bukan karena kualitas dan jumlah

³⁹ *Ibid*, hlm. 10

⁴⁰ The FSA's International Agenda, (FSA Report, 2010), hlm. 3

⁴¹ *Ibid*, hlm. 5

pelayanan cabang atau divisi syariah yang mereka miliki, tapi lebih kepada pesatnya perkembangan dan permintaan masyarakat akan layanan unit syariah ini.

Bank yang membuka layanan keuangan Islam melalui cabang maupun divisi syariahnya, yaitu Citibank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), dan ANZ Bank. Bank-bank ini ternyata telah lama melihat peluang dan cepat merespons keinginan banyak nasabah Muslim di Inggris.⁴² Mereka juga menganalisis potensi perkembangan perbankan Islam dalam beberapa tahun ke depan di Inggris. Permintaan itu tidak hanya datang dari nasabah perseorangan, tapi juga industri atau korporasi lain. Maka dari itu, tepat waktunya bila pemerintah Inggris mulai membuka sendiri sistem perbankan Islam di negaranya.

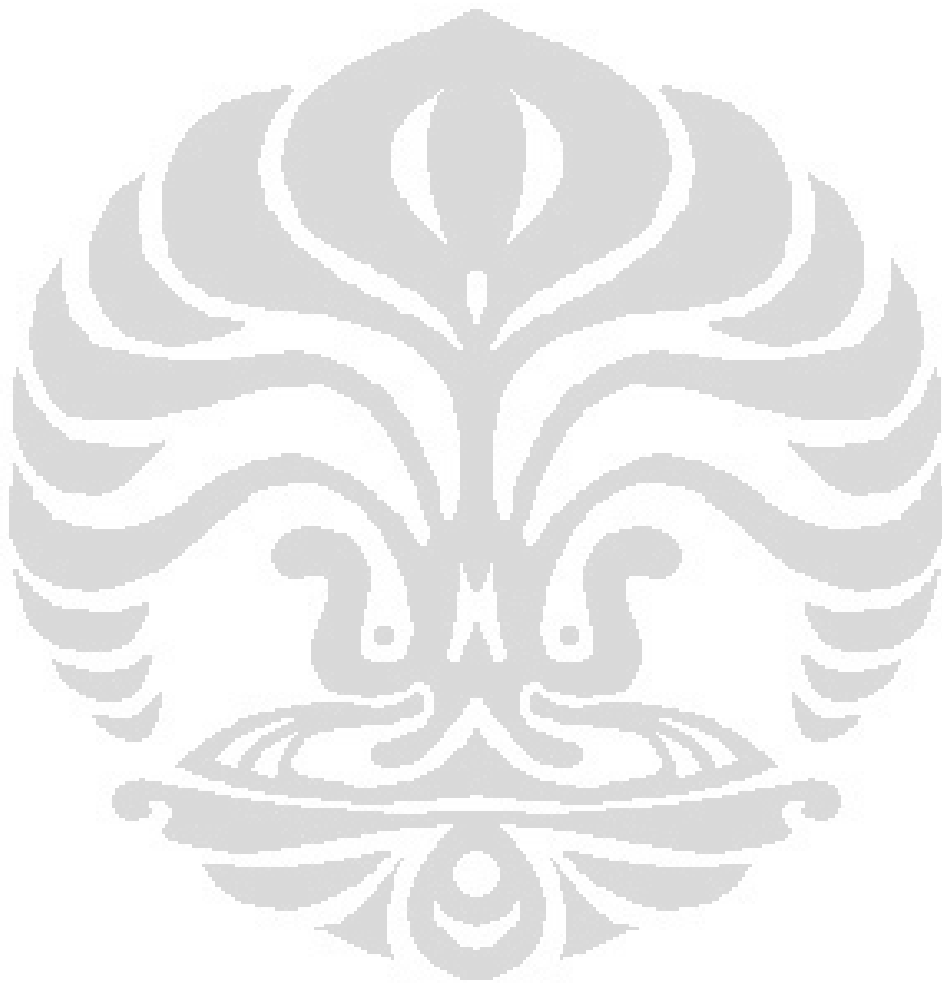
IBB bertekad untuk menggaet sedikitnya 75% umat Islam seantero Inggris. Dengan modal awal sekitar 14 juta poundsterling atau sekitar 25 juta US\$⁴³, IBB akan menjadikan bank Islam ini sebagai bank yang dituju banyak umat Islam Inggris dan Eropa yang ingin menyimpan maupun mengelola dananya berdasarkan syariah Islam. Modal awal IBB sebagian besar diperoleh dari suntikan dana negara-negara di kawasan Teluk, terutama dari keluarga Kerajaan Qatar dan Qatar Internasional Islamic Bank.⁴⁴ Seperti bank-bank konvensional pada umumnya, ke depan, IBB berencana menambah lagi dananya agar dapat melakukan ekspansi lebih jauh. Penambahan dana diharapkan datang dari Timur Tengah dan melalui *initial public offering (IPO)*.

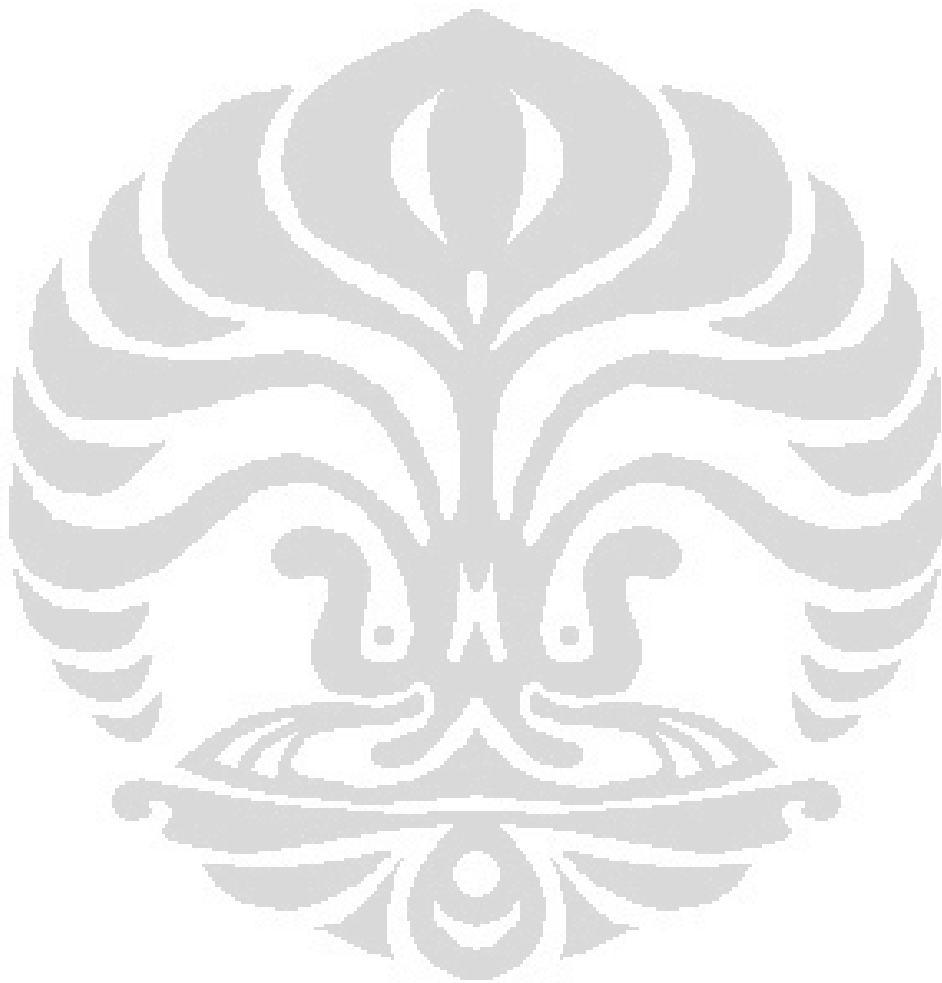
Inggris memang menjadi pionir di antara negara Eropa yang mengizinkan operasionalisasi bank berbasis Islam dan sepenuhnya menggunakan tata cara syariah. Negara ini juga berhasil menepis prinsip bank tanpa bunga yang pada awalnya tidak dapat diterima di kalangan Barat. Bahkan, beberapa pengamat ekonomi memprediksikan pertumbuhan pasar keuangan Islam di dunia akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya perkembangan bank-bank berbasis Islam di dunia.

⁴² *Ibid*, hlm. 9

⁴³ W. Edwards, *Islamic Banking*, (Princeton Economic Journal, 2009), hlm. 11-12

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 23





yang memiliki cabang syariah), beberapa di antaranya berbasis di Inggris dan lainnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Islamic window ini telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi Islam berkat pengalaman institusi-institusi multinasional dalam mengembangkan produk dan akses mereka ke sumber daya dan pasar yang jauh lebih besar ketimbang di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Berikut adalah tabel yang memuat data bank di Inggris yang berbasis syariah dan bank konvensional yang memiliki divisi syariah (*Islamic window*):

Bank Islam/Bank Syariah	<i>Islamic Windows</i>
Islamic Bank of Britain	ABC International bank
European Islamic Investment Bank	Ahli United Bank
Bank of London and the Middle East	Bank of Ireland
Gatehouse Bank	Barclays
Qatar Islamic Bank UK	BNP Paribas
	Bristol & West
	Citi Group
	Deutsche Bank
	Europe Arab Bank
	HSBC Amanah
	IBJ International London
	Lloyds Banking Group
	Royal Bank of Scotland
	Standard Chartered
	UBS
	United National Bank

Tabel 2.1 Bank Islam di Inggris (2009)

2.1.1 Kelebihan likuiditas di Timur Tengah

Kenaikan tajam harga minyak sejak tahun 2003 telah menghasilkan surplus likuiditas dalam jumlah besar dan meningkatnya permintaan untuk aset ekonomi dan keuangan Islam di negara-negara pengekspor minyak Timur Tengah. Sedangkan di sisi lain, kapasitas pasar keuangan belum mampu mengimbangi *demand* yang tinggi. Akibatnya, permintaan telah jauh melebihi pasokan dan investor Timur Tengah berusaha untuk mencari alternatif yang cocok.⁴⁷

Tuntutan ini dengan cepat diidentifikasi oleh lembaga-lembaga Islam dan konvensional yang sekarang menyediakan aset yang dijual ke para investor ini, sesuai dengan syariat Islam. Hal ini adalah langkah dan peluang penting bagi Inggris. Contoh implementasi ini adalah akuisisi *Aston Martin* oleh dua lembaga keuangan Kuwait, menggunakan pembiayaan berbasis syariah.⁴⁸

Sejak awal tahun 2000, pemerintah Inggris telah memperkenalkan serangkaian perubahan pajak dan regulasi yang dirancang untuk menghilangkan hambatan bagi pengembangan ekonomi Islam. Kemudian, FSA melakukan klarifikasi kerangka pajak (UU Keuangan 2007) untuk produk ekonomi dan keuangan Islam yang bernama *sukuk*.⁴⁹

Pembentukan FSA pada tahun 1997, dikombinasikan dengan 11 regulator yang berbeda ke dalam satu tubuh di bawah satu bagian dari undang-undang. Secara khusus, FSA mampu melihat sistem ekonomi secara keseluruhan untuk menilai kelayakan lembaga ekonomi dan keuangan Islam beserta produknya dalam perekonomian Inggris.⁵⁰

⁴⁷ Rodney Wilson, *Islamic Finance in the UK: Regulations and Challenges*, (London: FSA Document, 2007), hlm. 6

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 11

⁴⁹ *Sukuk* didefinisikan sebagai *Islamic Bond* atau produk perbankan Islam berupa surat berharga/surat utang yang sesuai dengan syariah/Islam. (selengkapnya, HSBC Amanah, *Islamic Finance: Glossary of Terms and Contracts*)

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 14

Ada empat lembaga-lembaga internasional utama yang berkaitan erat dengan industri ekonomi Islam:⁵¹

1. Akademi Fiqh
2. *Islamic Development Bank (ISDB)*
3. *Islamic Financial Services Board (IFSB)*
4. *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*

Lembaga-lembaga tersebut bersinergi dengan organisasi-organisasi besar lainnya menyediakan data dan informasi mengenai dinamika ekonomi Islam di suatu negara. Dalam hal pendidikan dan pelatihan ekonomi Islam, lembaga yang menyediakan kualifikasi profesional di bidang ekonomi Islam meliputi:

1. *The Institute of Islamic Banking and Insurance, UK*
2. *The International Centre for Education in Islamic Finance, Malaysia*
3. *The Chartered Institute of Management Accountants*, berbasis di Inggris dan berfungsi mengeluarkan sertifikat ekonomi Islam tahun 2007

Menyadari perlunya standar regulasi, *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* didirikan. AAOIFI berperan dalam menyoroti kebutuhan peraturan khusus dari lembaga keuangan Islam. Lebih jauh, otoritas pengaturan dan pengawasan, dengan bantuan IMF, membentuk badan pengawas berdedikasi yang dinamakan *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, di awal tahun 2000 untuk mengatasi stabilitas dan berbagai masalah peraturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan Islam. IFSB mengambil tantangan untuk memajukan dinamika ekonomi dan keuangan Islam pada tataran global dan mulai bekerja di bidang regulasi, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

⁵¹ Rodney Wilson, "The Institutional Infrastructure Supporting the Islamic Finance Industry", dalam *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investment*, (London: GMB Publishing, 2008), hlm. 21

Oleh karena itu, kerangka peraturan harus terus ditinjau dengan dukungan dari pemerintah terkait dan otoritas keuangan untuk memenuhi tantangan dan hambatan ekonomi Islam. Kemudian langkah ini bertujuan untuk efektifitas tata kelola sektor ekonomi Islam, dan yang paling penting adalah untuk memberikan solusi bagi komunitas Muslim di Inggris dan kebutuhan spesifik lain dalam ekonomi Islam.

Di negara-negara Eropa pada umumnya, pembiayaan perumahan Islam (*Islamic home financing*) belum diatur dalam kerangka regulasi yang ketat. Sehingga, produk ini menjadi kurang populer dalam ranah ekonomi Islam. Padahal penduduk Muslim Eropa relatif besar, khususnya penduduk Muslim Perancis yang hampir tiga kali lebih besar dari populasi Muslim Inggris (sekitar 6 juta jiwa).⁵² Hal ini mengindikasikan bahwa sebetulnya masih banyak peluang yang bisa didapatkan dari berbagai keuntungan produk ekonomi dan keuangan Islam.

Dengan *Islamic home financing* yang sudah diberlakukan di Inggris, diperkirakan akan ada peningkatan layanan ekonomi Islam di Eropa. Hal ini dikarenakan posisi Inggris sebagai pelopor dalam ekonomi dan keuangan Islam, sehingga produk dan kerangka hukum sudah lebih matang ketimbang negara Eropa lainnya. Satu hal yang harus diingat bahwa, negara-negara Eropa (selain Inggris) harus mempertimbangkan risiko dan tantangan yang telah dihadapi oleh Inggris dalam proses pelaksanaan *Islamic home financing* serta memahami manfaat dari pengalaman Inggris untuk memfasilitasi ekonomi Islam di negara mereka.⁵³

Hal ini memiliki manfaat yang lebih luas karena menunjukkan bahwa negara-negara Eropa memiliki komitmen atas ekonomi Islam, dan membantu posisi mereka untuk mengambil keuntungan dari peluang menarik investasi (FDI) yang berasal dari negara-negara Teluk. Pertumbuhan dramatis dalam *home*

⁵² *Op. Cit, Islamic Finance in the UK: Regulations and Challenges*, hlm. 13

⁵³ *Ibid*, hlm. 25

financing di Inggris telah tumbuh menjadi sekitar 50 miliar Euro, dengan peningkatan lebih dari 50 persen dari tahun sebelumnya.⁵⁴

Permintaan ekonomi Islam yang melonjak tinggi dan beberapa bank investasi global atau investor akan mendapatkan eksposur besar-besaran terkait dengan sukuk. Hal ini dikarenakan ukuran penerbitan dan permintaan dari lembaga-lembaga Islam lokal (negara-negara Teluk) untuk produk berbasis syariah yang semakin tinggi dan mereka perlu “memarkir” likuiditas besar-besaran yang disebabkan oleh lonjakan harga minyak di bank-bank negara Barat.

Menurut Moody, aset bank di Uni Emirat Arab (UEA) lebih dari 144 persen dari produk domestik bruto (PDB), yaitu 150 miliar US\$, sementara di Bahrain, rasio meningkat menjadi 98 persen dari PDB yaitu 109 miliar US\$.⁵⁵ Sebagai regulator perbankan, Bank of England dan FSA telah terbuka untuk perkembangan ekonomi Islam di Inggris untuk jangka panjang. Sinyal pertama diberikan dalam pidato oleh Edward George, gubernur Bank of England, pada bulan September 1995 di sebuah konferensi ekonomi Islam dunia. Dalam hal ini, ia mengakui “pentingnya pertumbuhan perbankan Islam di dunia Muslim dan kemunculannya di panggung internasional, serta kebutuhan untuk menempatkan perbankan Islam dalam konteks tradisi London dalam menunjukkan inovasi kompetitif.”⁵⁶

Sentimen-sentimen ini pertama kali diterjemahkan ke dalam praktek atau kegiatan ekonomi pada tahun 2001 ketika kelompok kerja yang diketuai oleh George dengan perwakilan dari kota London, pemerintah, komunitas Muslim dan FSA, didirikan untuk memeriksa hambatan-hambatan bagi perkembangan ekonomi Islam di Inggris. Salah satu yang teridentifikasi adalah fakta bahwa ekonomi dan keuangan Islam menarik materai ganda, baik atas pembelian properti oleh bank maupun pada pengalihan properti dengan bank untuk

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 26

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 26-27

⁵⁶ Michael Ainley, Ali Mashayekhi, Robert Hicks, Arshadur Rahman dan Ali Ravalia, “Regulations and Challenges in the UK” dalam *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investment*, (London: GMB Publishing, 2008), hlm. 177

pelanggan.⁵⁷ Seperti disebutkan di atas, setiap perubahan di sini adalah soal kebijakan publik, pemerintah kemudian merumuskan undang-undang khusus pada tahun 2003 untuk menghilangkan hambatan ini, yang kemudian disambut baik oleh Bank of England dan FSA.

Selain George, Sir Howard Davies adalah aktor penting di balik kemajuan-kemajuan yang dicapai terkait dengan ekonomi dan keuangan Islam di Inggris, khususnya ketika beliau masih menjabat sebagai Ketua FSA. Sebagai contoh, dalam pidato pada sebuah konferensi tentang perbankan dan ekonomi Islam di Bahrain pada bulan September 2003, ia berpendapat bahwa “Inggris memiliki kepentingan ekonomi yang cukup jelas untuk memastikan bahwa kondisi pasar keuangan dan ekonomi Islam dipusatkan di London. Hal ini dipicu oleh tujuan yang baik bagi konsumen Muslim, baik untuk inovasi dan keberagaman dalam pasar finansial sekaligus mengukuhkan London sebagai pusat keuangan syariah internasional ke depannya.”⁵⁸

Pidato Sir Howard Davies tersebut menandakan keseriusan pemerintah Inggris dalam mengembangkan perekonomian dan keuangan Islam dan menjadikan London sebagai pusat keuangan syariah internasional pertama di dunia Barat. Komunikasi politik Davies di Bahrain ini memberikan kontribusi positif dalam tingkatan hubungan internasional dan kerja sama ekonomi internasional antara Inggris dengan negara-negara Teluk. Lebih lanjut, FSA kini memiliki hubungan baik dan berkembang dengan industri, regulator dan kelompok kerja Islam lainnya di berbagai negara maupun organisasi internasional. Hal ini pula yang mendorong Parlemen Inggris untuk memiliki ahli ekonomi dan keuangan Islam dalam Kementerian Keuangan dan Bank sentral Inggris. Langkah ini didasari pula oleh keyakinan FSA sebagai lembaga pemerintah dalam memberikan otorisasi dan kerangka hukum kepada institusi keuangan dan ekonomi Islam.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 178

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 177

Sebagai hasilnya, pemerintah Inggris pada tahun 2008 mengumumkan upaya operasi penerbitan sukuk dalam pasar ekonomi domestik dengan merevisi undang-undang untuk menciptakan kerangka praktek ekonomi Islam yang komprehensif:⁵⁹

1. Merevisi undang-undang dalam UU Keuangan 2008 untuk memberikan bantuan dari pajak tanah materai untuk sukuk (disebut sebagai obligasi investasi keuangan alternatif);
2. Mengubah landasan hukum untuk mengklasifikasikan sukuk sebagai modal pinjaman bebas pajak;
3. Menyesuaikan undang-undang untuk memungkinkan pajak perusahaan yang ada dan aturan pajak penghasilan pada pengaturan ekonomi Islam (disebut sebagai pengaturan keuangan alternatif) yang akan diubah dengan peraturan, dan bekerja dengan regulator perbankan Inggris (FSA) dan pemangku kepentingan untuk memperjelas perlakuan peraturan sukuk,
4. Pemeriksaan kelayakan sukuk negara dalam RUU Keuangan 2008, mengambil kekuatan hukum untuk memfasilitasi setiap penerbitan sukuk.

2.2 Pengaruh Aspek Ekonomi Politik dalam Perkembangan Ekonomi Islam di Inggris

2.2.1 Aspek Ekonomi

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Islam telah mendorong banyak pusat-pusat keuangan internasional untuk mempertimbangkan proses transformasi menjadi pusat ekonomi Islam pula. Dalam hal ini, London telah berperan aktif sejak tahun 2004 dalam mengembangkan produk dan transaksi ekonomi Islam, dan Inggris adalah negara Barat pertama yang berani mengambil langkah strategis berupa perubahan UU Keuangan untuk mengakomodasi kepentingan institusi ekonomi dan keuangan Islam.

⁵⁹ *Ibid*, 179

Di Timur Tengah, Dubai memimpin sebagai pusat keuangan dan ekonomi Islam dengan jumlah maupun volume transaksi mengungguli negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain. Dubai dan London diperkirakan menjadi pusat keuangan dan ekonomi Islam internasional terkemuka, dengan Bahrain dan Kuala Lumpur sebagai *hub* yang juga tidak kalah penting.⁶⁰

Faktor determinan yang terkait dengan kepentingan nasional Inggris terhadap perkembangan ekonomi Islam menjadi semakin sentral posisinya. SWF, FDI, dan petrodollar akan memainkan peranan yang amat penting dalam dinamika ekonomi dan keuangan Islam di Inggris.

Hal ini berakibat pada bank-bank investasi besar dan bank komersial yang memiliki divisi khusus ekonomi dan keuangan Islam, yang di posisikan sebagai “perpanjangan tangan negara” jika pemerintah Inggris berhasil membangun pasar ekonomi dan keuangan Islam. Di samping itu, ada beberapa perusahaan jasa keuangan Islam di London yang memiliki peranan besar:⁶¹

1. IBB, lembaga keuangan Islam pertama yang diizinkan oleh FSA. Menadapatkan bantuan atau injeksi dana dari *Qatar International Islamic Bank* (QIIB) dan beberapa keluarga kerajaan Qatar sebagai modal awal operasional (*founding shareholder*).
2. *European Islamic Investment Bank* (EIIB), didirikan pada Januari 2005 dan menerima otorisasi dari FSA pada Maret 2006. Pada November 2006, EIIB membuka kantor perwakilan di Bahrain. EIIB adalah salah satu bentuk formal ikatan kerja sama antara pemerintah Inggris dan Bahrain dalam membentuk pasar yang kondusif dan kompetitif sejak pengalaman pertama penetrasi ekonomi Islam di tanah Inggris melalui bank Al-Baraka yang dimiliki oleh Bahrain.
3. *Bank of London and Middle East* (BLME), 20% saham BLME dimiliki oleh bank Boubayan (Kuwait). Berdirinya BLME merupakan indikasi pentingnya perkembangan infrastruktur ekonomi dan keuangan Islam di

⁶⁰ Aggrawal & Yousef, *Islamic banks and Investment Financing*, (Journal of Money, Credit, and Banking. Vol. 32, 2000), hlm. 120

⁶¹ *Ibid*, hlm. 123

Inggris. Maka dari itu, London saat ini memiliki lebih banyak aktivitas di bidang ekonomi dan keuangan Islam ketimbang negara Eropa lainnya.

Ketiga lembaga tersebut menjadi tonggak penting dalam dinamika ekonomi dan keuangan Islam internasional secara umum, dan Inggris secara khusus. Dengan interkoneksi dan volume produk perbankan yang semakin meningkat, Inggris menjadi semakin mapan posisinya sebagai pusat keuangan Islam di Eropa.

Pada 8 Maret 2008, The London Stock Exchange (LSE) memilih Qatar sebagai partner utama di GCC. Salah satu faktor penting dalam kesepakatan Qatar - LSE adalah hubungan antara Borse Dubai dan NASDAQ, yang mengesampingkan kerjasama jangka panjang dengan Dubai.⁶² Kesepakatan ini akan melibatkan LSE sebagai penyedia layanan dan teknologi untuk pengembangan pasar saham Doha sebagai pusat perdagangan regional di GCC.

Lebih lanjut, peranan LSE dalam pasar saham Doha, merupakan bagian dari hubungan komersial antara kedua bursa. Pengumuman ini membuka kemungkinan hubungan yang lebih mendalam dan memperbesar peluang maupun akses London terhadap likuiditas yang besar di GCC.

Implikasi dari aliansi tersebut memang belum muncul. Namun, berbagai kalangan akademisi maupun pejabat pemerintah Inggris menilai bahwa, masuknya Inggris di antara negara-negara GCC akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan Islam melalui berbagai keuntungan bisnis, ekonomi politik, maupun strategis. Inisiatif Inggris sebagai negara non-Islam untuk menjadi tempat terkemuka bagi ekonomi dan keuangan Islam menempati posisi yang sangat penting. Artinya, ekonomi dan keuangan Islam mencapai kemajuan pesat di luar negara-negara Islam.

⁶² *Ibid*, hlm. 124

2.2.2 Aspek Politik

2.2.2.1 Kebijakan Pemerintah Inggris yang Akomodatif Terhadap Perkembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam

Pemerintah Inggris telah menunjukkan keinginannya untuk menetapkan London sebagai pusat keuangan Islam internasional dan ingin menarik investasi sebanyak-banyaknya dari negara-negara Teluk yang kaya akan petrodolar. Visi pemerintah Inggris ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai negara Teluk dan negara Islam lainnya, karena dengan begitu, mereka memiliki *partner* untuk memasarkan produk keuangan Islam di negara-negara Barat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Inggris adalah satu-satunya pusat keuangan Islam di Eropa hingga saat ini.

Jika pemerintah Inggris berhasil dalam mencapai visi dan misinya dalam menjadikan London sebagai pusat keuangan Islam internasional yang mampu bersaing dengan Malaysia dan Dubai, pasar keuangan Islam akan bergabung dengan pasar modal internasional (sebelumnya pasar Eurobond) sebagai pasar yang berkembang di London dan bertindak sebagai 'saluran' untuk modal global. LSE telah membuat daftar sejumlah hambatan dan masalah dalam pengembangan pasar keuangan Islam.

David Shrimpton, Kepala Manajemen Produk dan Pengembangan LSE, mengatakan bahwa, "Rentang produk keuangan Islam yang terdaftar di pasar utama LSE terus tumbuh. Beberapa tahun belakangan kita telah mengakui 14 instrumen keuangan Islam, termasuk sukuk untuk perdagangan di pasar kami, yang telah mencetak profit lebih dari 5 miliar Euro".⁶³

Inggris (khususnya London) merupakan pusat keuangan Islam internasional di Eropa dan merupakan salah satu lokasi yang potensial dan atraktif dalam mengundang investor asing. Dalam hal ini, London masih terpaut jauh – dan seharusnya mampu menjalin kerja sama intensif - dengan Dubai yang merupakan

⁶³ Fahim Khan dan Mario Porzio, *Islamic Finance in Europe*, (UK: Edward Elgar Publishing, 2010), hlm. 212

pusat keuangan Islam global. Untuk mengevaluasi kelayakan pengembangan pasar keuangan Islam di London, ada beberapa fitur kunci yang meliputi:

1. Ketersediaan lembaga pemeringkat obligasi utama;
2. Perdagangan pasar sekunder dan likuiditas;
3. Ketersediaan dan transparansi harga pasar sekunder;
4. Ketersediaan indeks yang dapat diandalkan dan dipublikasikan;
5. Transparansi emiten yang mendasari dalam hal akuntansi dan tata kelola perusahaan;
6. Ketersediaan perjanjian untuk mendokumentasikan isu syariah;
7. Kesesuaian dengan hukum syariah;
8. Investasi dalam instrumen tersebut oleh investor dari berbagai negara Islam dan non-Islam.

Untuk memenuhi persyaratan ini, pemerintah Inggris telah menunjukkan keinginannya untuk menerbitkan surat utang negara dalam bentuk sukuk, yang akan memberikan dasar untuk perdagangan aktif dan untuk harga efek perusahaan. Sejauh ini, pemerintah yang sukses dalam menerbitkan obligasi sukuk tersebut adalah Iran, Pakistan, dan Malaysia.⁶⁴

Obligasi atau sukuk tersebut tidak hanya memungkinkan pengembangan pasar keuangan Islam di London, tetapi juga akan memungkinkan pemerintah, untuk mengeluarkan tabungan Islam berdasarkan instrumen yang mendasarinya.⁶⁵ Hal ini akan tersedia bagi Muslim dan non-Muslim melalui bank-bank syariah maupun konvensional yang memiliki divisi syariah

Pada bulan Oktober 2007, keraguan mulai timbul atas kompleksitas masalah tersebut. Secara khusus, undang-undang harus melalui parlemen untuk membuat penerbitan sukuk menjadi praktis. Memproduksi undang-undang tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama di parlemen, selain itu, berdampak negatif

⁶⁴ *Op. Cit, Islamic banks and Investment Financing*, hlm. 44

⁶⁵ *Op. Cit, Islamic Finance in Europe*, hlm. 214

pada efisiensi dan efektifitas perundang-undangan lainnya dalam agenda Parlemen.⁶⁶

Pada bulan November 2007, Kementerian Keuangan Inggris mengeluarkan sebuah *report* berjudul “*Sovereign Sukuk Issuance: Consultation*”. Hal ini mengindikasikan tujuan dan komitmen Pemerintah terhadap ekonomi dan keuangan Islam.⁶⁷ Di samping itu, rencana penerbitan sukuk juga menandakan dua hal: pertama, untuk menjadikan London sebagai *gateway* untuk keuangan Islam dan kedua, untuk memastikan bahwa semua warga negara Inggris, terlepas dari iman mereka, memiliki akses ke layanan keuangan yang kompetitif.

Masalah struktural lainnya adalah menentukan jenis kontrak yang akan digunakan, apakah *Sukuk al-Ijarah* (menggunakan kontrak sewa) atau *Sukuk al-Mudharabah* (berdasarkan kemitraan).⁶⁸ Tanpa penuntasan masalah ini, akan ada kekurangan yang fundamental, karena tujuan utama pemerintah Inggris adalah untuk memfasilitasi pengembangan pasar keuangan Islam di London dan obligasi korporasi di luar negeri.

Terlepas dari berbagai kepentingan ekonomi, politik, maupun bisnis, perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di Inggris dipengaruhi pula oleh komunitas maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Islam yang berperan aktif dalam proses advokasi, promosi, dan pengawasan. *Islamic Finance Council*, *Muslim Council of British*, *Islamic Society of Britain*, dan *Islamic Sharia Council* adalah contoh komunitas dan organisasi Islam yang beroperasi di Inggris sebagai pengejawantahan kepentingan muslim minoritas muslim di Inggris.

Islamic Finance Council dan *Muslim Council of British* adalah dua contoh organisasi terbesar dengan anggota yang tersebar di seluruh wilayah Inggris. Kedua organisasi ini pula yang menjadi poros utama dalam dinamika ekonomi dan keuangan Islam, khususnya membantu institusi pemerintah terkait,

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 215

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 216

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 218

mengadakan pelatihan dan pendidikan mengenai praktek ekonomi dan keuangan Islam, dan mempromosikan produk-produk agar bersifat universal.

Selain itu, organisasi muslim ini juga memiliki koneksi dengan anggota parlemen Inggris (lebih tepatnya *House of Commons*) agar aspirasi dan segala informasi mereka dapat tersampaikan dalam agenda ekonomi Inggris. Ada pun, *Islamic Finance Council* memainkan peran sentral sebagai mitra institusi pemerintahan (Parlemen, FSA, dan *UK Trade and Investment*) dalam memberikan saran terhadap kebijakan terkait dan mengoptimalkan *sharia governance*.⁶⁹

Keseriusan pemerintah Inggris dalam ekonomi dan keuangan Islam terlihat sampai pada tataran elit politik dan pejabat negara. Hal ini terlihat pada *Associate Parliamentary Group on Islamic Finance and Diversity in Financial Markets*, sebuah badan khusus dalam parlemen yang menangani keuangan Islam dan diversitas pasar finansial. Tujuan dari badan khusus ini adalah: “*To give the Islamic finance industry a voice in the House in order to address issues of concern, specifically but not limited to Sovereign Sukuk and positioning the UK as the European hub of Islamic financial services, and to address other issues as they arise, such as inclusivity, diversity, Islamic LIBOR (London Interbank Offered Rate), regulation and taxation.*”⁷⁰

Pemerintah Inggris, dari tingkat parlemen, kementerian keuangan, dan FSA, bekerja secara bersinergis dalam mengurus perkembangan ekonomi dan keuangan Islam yang mendatangkan banyak keuntungan, meskipun sistem ekonomi ini masih tergolong “muda” usianya dan belum mapan dalam beberapa tahapan untuk diterapkan di negara-negara Barat.

⁶⁹ Diakses dari <http://www.ukifc.com/about>, pada tanggal 1 Mei 2012, 18.33 WIB

⁷⁰ Diakses dari <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmllparty/register/islamic-finance-and-diversity-in-financial-markets.htm>, pada tanggal 1 Mei 2012, 18. 39 WIB

2.3 Motivasi Inggris dalam Menjadikan Kota London Sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia

Inggris merupakan negara perwakilan untuk tujuan investasi ekonomi Islam di Eropa karena beberapa alasan. Inggris adalah negara non-Islam pertama yang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengadopsi dan mendorong Ekonomi Islam.

Produk perbankan yang pertama kali ditawarkan untuk Muslim Inggris adalah fasilitas deposito secara Mudharabah. Permintaan akan produk ini terus meningkat pada tahun 1983-1991 dari 23 juta Euro menjadi 154 juta Euro, sehingga jelas menunjukkan bahwa permintaan untuk perbankan Islam di Inggris meningkat drastis.⁷¹

Oakely menunjukkan bahwa bentuk pertama perbankan Islam di Inggris adalah bank investasi, di mana bank tersebut akan mendirikan cabang baru di kawasan Teluk. Hal ini diperlukan sebagai akses likuiditas ekonomi dan keuangan Islam.⁷² Lebih lanjut, bank-bank Islam tidak diijinkan untuk memegang aset likuid seperti *treasury bills* (riba). Untuk itu, bank-bank di London, seperti *Bank of London* (bank sentral Inggris), mulai menerima deposito dan transaksi Murabahah, dengan perdagangan jangka pendek menjadi transaksi di London Stock Exchange. Akibatnya, bankir Inggris non-Muslim berusaha untuk segera menjadi ahli dalam prinsip-prinsip maupun metode pembelajaran syariah yang inovatif dalam menanggapi permintaan klien Muslim.

Pada tahun 1976, *Institute of Islamic Banking and Insurance* didirikan di St. King's Cross, kemudian pada tahun 1990 dipindahkan ke Grosvenor Crescent (West End), daerah yang banyak dihuni oleh orang-orang kaya dari Timur Tengah. Pada tahun 1997, United Bank of Kuwait memasuki pasar perumahan Inggris dengan menawarkan struktur angsuran Murabahah.⁷³ Pemerintah Inggris sangat antusias untuk menunjukkan bahwa mereka secara aktif mampu

⁷¹ *Islamic Finance*, (The City UK Publication, 2011), hlm. 4

⁷² *Ibid*, hlm. 5

⁷³ *Ibid*, hlm. 6-8

memfasilitasi umat Islam yang belum pernah menggunakan perbankan konvensional karena tidak berbasis syariah.⁷⁴

AS memiliki sistem perbankan yang menarik bagi investor luar negeri, termasuk GCC yang kaya akan minyak bumi. Kemudian, konflik antara AS dan Timur Tengah meletus pada tahun 2001 akibat serangan teroris (insiden 11 September) dan memicu permusuhan terhadap komunitas Muslim di AS. Hal ini menyebabkan banyak umat Islam menutup *account* bank di AS dan mencari tempat-tempat baru untuk menempatkan uang mereka.⁷⁵ Nilai dari deposito ini ditaksir hingga 250 miliar Euro, dan berimbas kepada perjuangan Inggris untuk menggantikan AS dan menyatakan niat mereka untuk menjadi pusat keuangan ekonomi Islam di luar negara-negara Islam.

Iklim perbankan Islam saat ini membuktikan bahwa Inggris mampu membuktikan dirinya sebagai inovator produk-produk yang terus berkembang. IBB menjadi lembaga Islam pertama di dunia Barat yang menawarkan Murabahah, membuktikan bahwa ekonomi Islam bersifat dinamis dan memiliki sektor keuangan yang inovatif.

IBB telah mendapatkan persetujuan FSA dan membuka cabang pertama mereka di Edgware Road pada bulan September 2004 dan memiliki kantor pusat di Birmingham. Lokasi cabang dan kantor pusat ini cukup signifikan, karena ditempatkan di dua wilayah di Inggris dengan kepadatan penduduk Muslim tertinggi.⁷⁶ Pada akhir tahun 2005 IBB membuka 5 cabang baru sekaligus menunjukkan bahwa permintaan untuk perbankan dan ekonomi Islam meningkat secara signifikan pula, menggambarkan kondisi serupa dengan Al-Baraka Bank pada tahap awal Ekonomi Islam di Inggris.⁷⁷

Ayub lebih jauh berpendapat bahwa dewasa ini pemerintah mengembangkan pasar dengan melakukan perubahan: diperlukan undang-undang

⁷⁴ *Ibid*, Hlm. 10

⁷⁵ *Op. Cit, Gulf Capital & Islamic Finance: The Rise of the new Global Players*, hlm. 44

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 70

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 56

dan peraturan untuk mendukung sektor perbankan Islam.⁷⁸ Maka hasilnya adalah UU Keuangan 2003, 2005, dan 2006 serta penghapusan bea meterai ganda. Inilah yang menyebabkan rintangan yang membatasi *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Musharakah* menjadi berkurang. Melalui akuisisi, bank membeli infrastruktur dari bank komersial lain untuk menjual produk-produk Islam. Namun, bank-bank Islam GCC seperti ABC international Bank kemudian mengakui potensi besar di Inggris dan melakukan ekspansi dengan kemitraan bersama bank konvensional untuk mendistribusikan instrumen keuangan mereka melalui cabang di Inggris.⁷⁹

Naiknya harga minyak menandakan bahwa surplus likuiditas di Timur Tengah meningkat. Untuk mencegah kejenuhan pasar uang di GCC, kemudian sejumlah uang diinvestasikan di negara lain dan aset keuangan asing. Saat ini ada delapan Sukuk, dengan volume yang diperkirakan bernilai sebesar 70 miliar US\$ yang dikeluarkan di LSE dan telah berkembang sejak awal karena pembentukan LSE sebagai pasar sekunder.⁸⁰

Para penggiat ekonomi Islam di Inggris, dewasa ini, berusaha untuk mendirikan kantor di kawasan Teluk (GCC) karena pengetahuan dan keahlian terkait dengan praktek ekonomi dan keuangan Islam yang akan diperoleh dengan hubungan mereka yang harmonis dengan para pengusaha dari kawasan tersebut. Hal ini akan memungkinkan hubungan yang erat serta menarik penggiat ekonomi negara-negara Teluk untuk melakukan investasi di Inggris.

Berangkat dari pencapaian-pencapaian penting yang telah dicapai melalui berbagai aspek, tidak ada alasan lain bagi Inggris untuk mendeklarasikan diri sebagai pusat ekonomi dan keuangan Islam internasional. Apalagi Inggris diuntungkan dengan posisinya sebagai pusat keuangan internasional sejak dahulu, dimana London menyandang predikat sebagai salah satu kota yang paling menarik bagi para investor internasional.⁸¹

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 58

⁷⁹ *Op. Cit*, *Gulf Capital & Islamic Finance: The Rise of the new Global Players*, hlm. 47

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 12

⁸¹ *The City UK Report 2010*, hlm. 10

BAB 3

KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK INGGRIS DALAM PENERAPAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

3.1 Analisis Peranan Faktor Ekonomi Politik dalam Sistem Ekonomi dan keuangan Islam di Inggris

Clement Henry berpendapat bahwa: “kondisi perbankan Islam tidak berkaitan dengan gaya perekonomian negara Barat atau demokrasi liberal, karena aktivitas ekonomi mereka tidak menyebabkan kondisi politik internasional yang lebih kompetitif. Keberhasilan ekonomi Islam dalam menata panggung demokrasi yang lebih besar dengan mendorong partisipasi rakyat dalam kegiatan keuangan (di bawah rezim politik otoriter dan diktator di Timur Tengah) terlihat dari: 1) penggeseran beban politik dalam gerakan Islamis yang mendukung 'tanggung jawab' elemen bisnis dan siap untuk hidup berdampingan dengan tatanan kapitalis, serta dengan 2) mengumpulkan modal untuk konsolidasi kekuatan struktural dari sistem perbankan komersial dan otonomi sektor bisnis swasta”.⁸²

Hal ini kemudian berefek pada peran keuangan Islam di tataran *New World Order*, dengan alasan bahwa lembaga keuangan Islam terlalu sering mendapat cap ‘*guilty by association*’⁸³. Terminologi ini dipopulerkan oleh Clement Henry ketika melihat bahwa perkembangan positif sistem ekonomi dan keuangan Islam secara global berbenturan dengan pandangan global yang ‘dikerucutkan’ oleh kaum barat: bahwa Islam adalah teroris, dan berlaku sebaliknya.

Melihat data dan fakta yang terkumpul terkait dengan perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam di Inggris, ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan dalam membedah kepentingan utama Inggris dalam menerapkan sistem tersebut. Penulis melihat bahwa SWF, FDI, dan petrodolar berhasil menarik minat bisnis yang tinggi dalam ekonomi dan keuangan Islam di Inggris. Hal ini pula

⁸² Clement M. Henry, *The Mediterranean Debt Crescent: Money and Power in Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey*, University Press of Florida 1996, hlm. 22

⁸³ *Op. Cit.*, *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh University Press, 2000), hlm. 221

yang kemudian menjadi faktor ekonomi yang menyebabkan pemerintah Inggris semakin serius memantau perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam. Berbagai usaha, baik ekspansi bisnis, kemitraan, dan pengawasan di tingkat regulasi telah dilakukan Inggris agar perkembangan sistem ini dapat terus positif.

Di sisi lain, penulis menilai bahwa pemerintah Inggris beserta komunitas muslim Inggris memainkan peran yang vital dalam dinamika ekonomi dan keuangan Inggris. Maka dari itu, untuk membedah kepentingan utama dan keuntungan yang didapatkan, penulis menganalisis faktor ekonomi dan politik secara lebih komprehensif untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini.

3.1.1 Petrodolar, SWF, dan FDI Sebagai Faktor Ekonomi Terhadap Perkembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam di Inggris

Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga minyak telah menyebabkan redistribusi yang signifikan terhadap pendapatan global dari negara pengimpor minyak, ke negara pengekspor minyak.⁸⁴ Dalam hal ini, eksportir cenderung menerima pendapatan minyak sekitar 970 miliar US\$ pada tahun 2006 (meningkat hampir 670 miliar US\$) sejak 2002) dengan sebagian dari keuntungan terhadap segelintir negara.⁸⁵

Penulis menitikberatkan dinamika ekonomi dan keuangan Islam di Inggris yang semakin berkembang pesat karena negara pengekspor minyak (khususnya GCC) memiliki dua opsi ketika akan menempatkan petrodolar mereka. Pertama, petrodolar dapat digunakan untuk impor barang dan jasa. Kedua, petrodolar dapat digunakan untuk membeli aset asing di pasar modal internasional.

Cara-cara yang diterapkan oleh negara eksportir minyak dalam menyebarkan petrodolar mereka memiliki implikasi penting untuk negara-negara pengimpor minyak. Harga minyak yang tinggi akan mengurangi daya beli di negara pengimpor minyak, dengan demikian pertumbuhan akan terhambat. Tetapi,

⁸⁴ Federal Reserve Bank of New York, Vol. 12, No. 9 December 2006, hlm. 1

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 3

ketika eksportir minyak menggunakan pendapatan dari penjualan minyak untuk meningkatkan pembelian mereka dari negara pengimpor minyak, efek negatif terhadap pertumbuhan bisa dikurangi.

Peningkatan pembelian aset asing oleh eksportir minyak juga dapat membantu mempertahankan *growth* di negara pengimpor minyak, meskipun efeknya tidak otomatis bisa dirasakan. Pembelian aset tersebut adalah bentuk pinjaman: akibatnya, importir minyak dapat mempertahankan konsumsi dan pengeluaran investasi dengan meminjam dari negara eksportir minyak untuk membiayai tagihan impor minyak yang tinggi.⁸⁶

Lebih lanjut, untuk menganalisis bagaimana arah petrodolar, kita perlu mempertimbangkan fakta bahwa ekspor non-migas oleh negara-negara pengeksportir minyak juga naik dalam beberapa tahun terakhir. Memang, ekspor non-migas naik sekitar 310 miliar US\$ dari 2002-2006 (sekitar 450 miliar US\$ dari penjualan yang lebih tinggi dari gas alam).⁸⁷

Teori ekonomi menunjukkan bahwa petrodolar yang bersifat sementara sebagian besar akan disimpan, sementara petrodolar permanen sebagian besar akan dikonsumsi. Namun, yang patut dipertanyakan adalah, bagaimana menjustifikasi kenaikan harga minyak yang akan bersifat sementara atau permanen? Bahkan, penghematan negara eksportir minyak telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 28 % dari GDP (*Gross Domestic Product*) pada tahun 2002 menjadi 39 % pada tahun 2006.⁸⁸

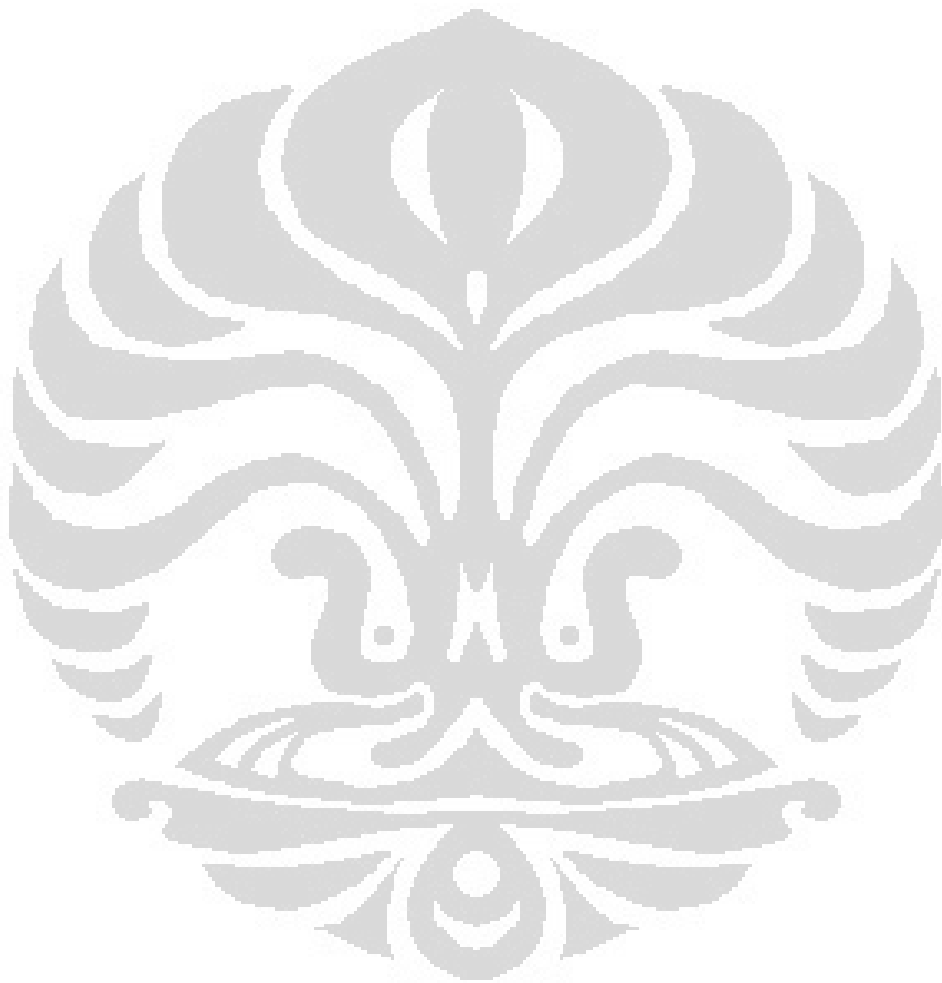
Pengaruh kenaikan harga minyak impor terhadap kondisi makroekonomi tergantung pada bagaimana eksportir minyak menyebarkan petrodolar mereka. Daur ulang petrodolar (*petrodollar recycling*) untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara importir minyak bertujuan untuk ‘melunakkan’ harga minyak yang lebih tinggi. Daur ulang petrodollar melalui investasi di pasar modal

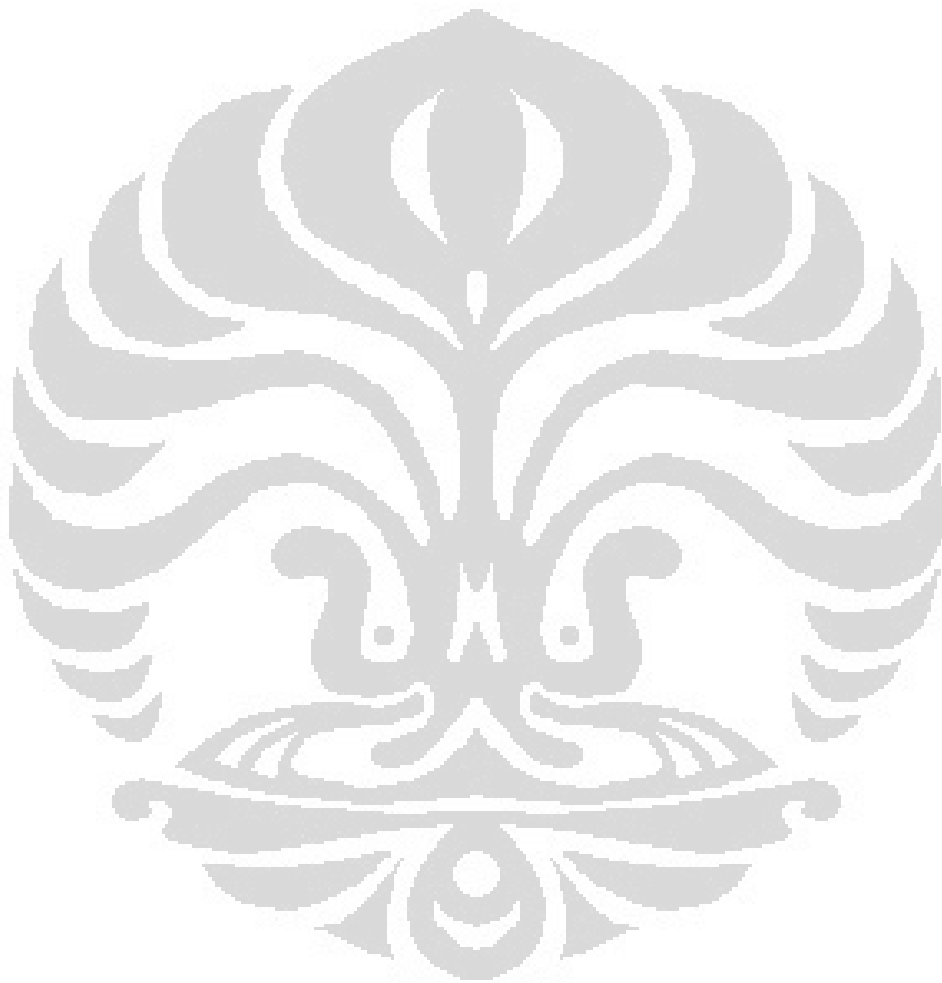
⁸⁶ Abbadi, *The integration of Islamic banking system and its positive effects on the Islamic world*, (Fifth Islamic Forum, 2003), hlm. 47-64.

⁸⁷ *Op. Cit*, *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh University Press, 2000), hlm.

76

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 68





kenaikan jumlah petrodollar akan berefek positif terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di tingkat internasional, khususnya di negara-negara Barat.⁹⁰

Selain instrumen petrodolar, SWF (*Sovereign Wealth Funds*) dan FDI (*Foreign Direct Investment*) juga merupakan aktor kunci dalam lanskap keuangan global saat ini. Kenaikan investasi negara-negara yang menggunakan SWF sangat mengesankan dengan jumlah transaksi tiga kali lipat antara tahun 2000-2008 dan melonjak drastis dari 4 miliar US\$ menjadi 130 miliar US\$.⁹¹ Beberapa ekonom mendefinisikan SWF sebagai lembaga politik yang ‘dipandu’ dengan menggunakan kekuatan finansial untuk mengamankan saham di sejumlah perusahaan Barat.

Kenyataannya, SWF saat ini adalah investasi terhadap institusi yang dinamis di kedua negara industri dan berkembang. Ledakan kegiatan investasi membutuhkan pengelolaan kekayaan nasional negara-negara dengan bijak.⁹² Hal ini juga menghasilkan gelombang skeptis dan ketidakpercayaan negara-negara OECD (*Organisation for Economic and Development*), yang melihat potensi ancaman terhadap struktur keuangan dan industri strategis.⁹³ Selain itu, keputusan investasi notabene bertujuan untuk memaksimalkan kembali resiko keuangan, artinya ekspektasi terhadap sentimen “apa yang akan didapatkan melalui SWF” menjadi krusial. Setiap keputusan investasi di luar aspek dan pertimbangan ekonomi dan keuangan harus secara jelas diatur dalam kebijakan investasi.

London merupakan *international financial centre* yang terkemuka dan penting posisinya bagi dinamika SWF dari berbagai penjuru dunia. Posisi yang kuat berasal dari kekuatan struktural yang terkait dengan jasa keuangan dan profesional, keterbukaan pasar, dan juga supremasi hukum Inggris yang kuat. Sejumlah SWF besar seperti *Kuwait Investment Authority*, *Brunei Investment*

⁹⁰ Masudul Choudhury, *Islamic Economics: A History*, (London: Routledge, 2001), hlm. 88

⁹¹ Bryan J. Balin, *Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis*, (The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS): Washington, 2008), hlm.11

⁹² *Ibid*, hlm. 13

⁹³ *Ibid*, hlm. 14-15

Agency, Abu Dhabi Investment Authority, dan Temasek/General Investment Corporation of Singapore memiliki kantor perwakilan di London.⁹⁴

Penulis menilai bahwa Inggris menyambut baik SWF di sektor keuangan dan industri lain karena pemerintah Inggris terbukti memiliki kompetisi, regulasi, dan stabilitas politik yang menjamin bahwa semua investasi asing, baik dari SWF atau tidak, memenuhi kriteria yang sesuai. Pemerintah Inggris berkomitmen untuk memastikan Inggris tetap menjadi pasar yang terbuka dan kompetitif bagi investasi internasional.

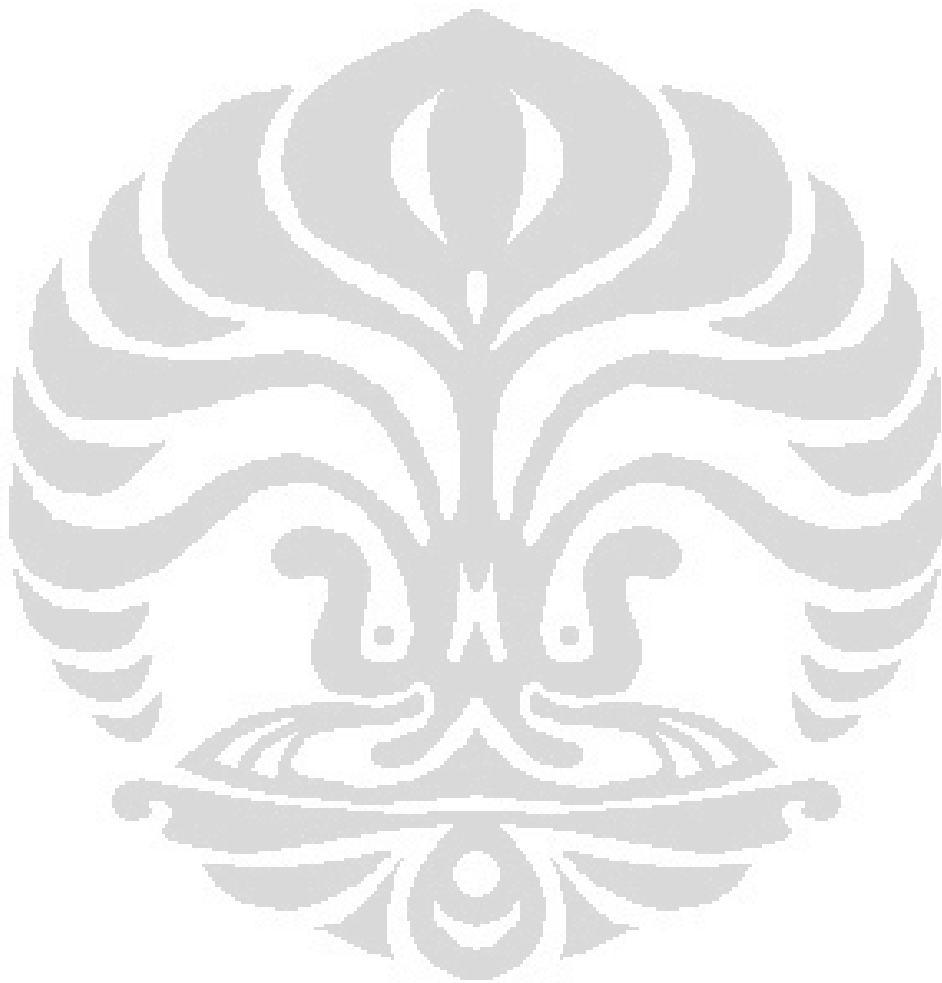
Sekitar satu dekade lalu, banyak negara-negara berkembang mulai mengakumulasi cadangan mata uang asing yang besar, mayoritas berasal dari kenaikan minyak, gas, dan sumber daya alam lain yang didukung oleh kebijakan ekonomi makro yang kondusif. Negara-negara Islam, khususnya negara eksportir minyak, menguasai lebih dari 50% dari seluruh aset SWF secara global, meskipun tidak semuanya adalah produk keuangan Islam.

<i>By country</i>	<i>\$bn</i>	<i>% share</i>
China	928	24
United Arab Emirates	677	18
Norway	445	12
Saudi Arabia	436	11
Singapore	370	10
Kuwait	203	5
Russia	168	4
Others	573	15
<i>By region</i>		
Middle East	1,620	43
Asia	1,350	36
Europe	670	18
Americas	90	2
Other	70	2
Total	3,800	

Source: SWF Institute, IFSL estimates

Tabel 3.1 SWF Market Share (2009), Sumber: SWF Institute, 2009

⁹⁴ “UK Economic Indicators”, diakses dari http://www.economywatch.com/world_economy/united-kingdom/uk-economic-indicators.html, pada tanggal 7 Juni 2012, 19.01 WIB



Tabel 3.1 menunjukkan bahwa 3 dari 6 anggota GCC (Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kuwait) merupakan raksasa SWF dunia. Disini terlihat jelas bahwa, Inggris yang berperan sebagai pusat keuangan internasional sekaligus pusat keuangan Islam di Barat, memiliki kepentingan ekonomi untuk menarik FDI (lihat grafik3.3) dan SWF besar-besaran dari GCC.

Ketiga faktor ekonomi (petrodolar, FDI, dan SWF) telah menjadi faktor penentu bagi penulis dalam menyoroiti perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam di Inggris. Penulis berpendapat bahwa, di poin ini, Inggris memiliki kepentingan yang lebih dominan dibandingkan dengan alasan mengaplikasikan sistem ekonomi dan keuangan Islam demi mencegah *financial exclusion* terhadap kaum muslim Inggris.

Inggris melihat bahwa sistem ekonomi Islam ini mampu menjadi ‘alat’ yang digunakan untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan keuntungan bisnis dan politik semata. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa, sektor jasa dan finansial Inggris menyumbang komposisi sebesar 76,2 % dari total GDP. Angka tersebut menunjukkan betapa sektor jasa dan finansial seperti perbankan, saham, dan asuransi, mendominasi perekonomian Inggris secara keseluruhan atau secara makroekonomi.⁹⁵

3.2 *Financial Exclusions* Sebagai Faktor Politik dalam Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Islam di Inggris

Inggris adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan London adalah pusat keuangan kelas dunia, namun ada banyak orang yang merasa ‘termarjinalkan’ dari industri jasa keuangan. Tingkat pengecualian ini bervariasi, namun fokus utamanya disini adalah mereka yang tidak memiliki rekening bank karena faktor keimanan mereka (muslim).

Seperti di negara-negara lain, kelompok yang mengalami istilah *financial exclusion* ini, adalah mereka yang hidup dengan penghasilan rendah, orang yang tinggal di daerah kumuh, orang dengan riwayat kerja yang tidak stabil, serta etnis

⁹⁵ *Loc. Cit*, “UK Economic Indicators”, diakses pada tanggal 7 Juni2012, 19.09 WIB

minoritas. Secara tradisional banyak Muslim di Inggris menjauhkan diri dari layanan keuangan konvensional dan menghindari berurusan dengan bank karena produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kondisi umat Islam di sebagian besar negara non-Muslim tidak terlalu menggembirakan. Mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang rendah dan tidak mampu memainkan peran utama dalam masyarakat mereka. Hal ini disebabkan oleh diskriminasi terhadap mereka dan ketidakmampuan untuk mengangkat kondisi ekonomi mereka.

Sejak terminologi ini ditujukan untuk peran bank Islam di negara-negara Barat, bukan berarti *financial exclusion* berkaitan secara langsung dengan cara-cara meningkatkan pendidikan umat Islam yang berperan penting untuk membangkitkan semangat sosial, ekonomi, dan politik dalam lapisan masyarakat yang sekuler. Pemerintah Inggris dalam mencegah *financial exclusion* memperlihatkan *concern* utama tentang peningkatan kondisi ekonomi kaum muslim.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh umat Islam dalam masyarakat sekuler adalah ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan bahkan ketika mereka memiliki pelatihan profesional sekalipun. Oleh karena itu, satu-satunya alternatif lain yang dimiliki oleh umat Islam dalam memperbaiki kondisi ekonomi mereka adalah wirausaha. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari pembiayaan Islam yang tersedia untuk mereka dalam, sehingga bank-bank Islam diharapkan mampu memainkan peran penting.

Ada dua kekhawatiran yang mungkin muncul di sini. Pertama, bank Islam akan menjadi layak jika mereka memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan mikro (UKM).⁹⁶ Oleh karena itu, dapat diharapkan bahwa UKM mungkin dapat

⁹⁶ Umer Chapra, *The Role of Islamic Banks in Non-Muslim Countries*, diakses dari <http://www.cibafi.org/NewsCenter/English/SavePage.aspx?id=7943&Type=4>, pada tanggal 7 Juni 2012, 18.02 WIB

menghasilkan keuntungan lebih tinggi untuk bank-bank Islam dan dengan demikian membantu meningkatkan profitabilitas mereka.

Kekhawatiran kedua adalah bahwa, jika UKM memiliki profitabilitas yang lebih tinggi, mereka akan memiliki integritas yang diperlukan untuk hidup sesuai dengan jadwal pembayaran mereka. Laporan dari *Select Committee on Hunger* juga menunjukkan bahwa proyek-proyek mikro bank Islam di Inggris telah mencatat tingkat pengembalian pinjaman yang signifikan.⁹⁷

Menurut Sinclair, kelompok yang paling mungkin terkena dampak *financial exclusion* termasuk “pengangguran, orang lanjut usia, orang tua tunggal wanita, dan beberapa kelompok etnis minoritas seperti Pakistan dan Bangladesh, yang tidak dapat menggunakan produk keuangan konvensional karena hambatan bahasa dan agama.”⁹⁸ Hampir semua penelitian yang dilakukan pada *financial exclusion* di Inggris menemukan bahwa agama dan religiusitas adalah salah satu alasan utama mengapa kelompok sosial tertentu memilih untuk tinggal jauh dari mengakses jasa keuangan arus utama.⁹⁹

Dewasa ini, umat Islam memiliki eksistensi yang semakin positif di Inggris dan terlihat di berbagai lapisan masyarakat Inggris. Ada yang berprofesi sebagai profesional muslim, akademisi, bahkan tokoh politik terkemuka termasuk beberapa anggota House of Commons dan House of Lords. Komunitas Muslim minoritas di Inggris memberikan kontribusi lebih dari 31 miliar Euro setiap tahun untuk ekonomi Inggris.

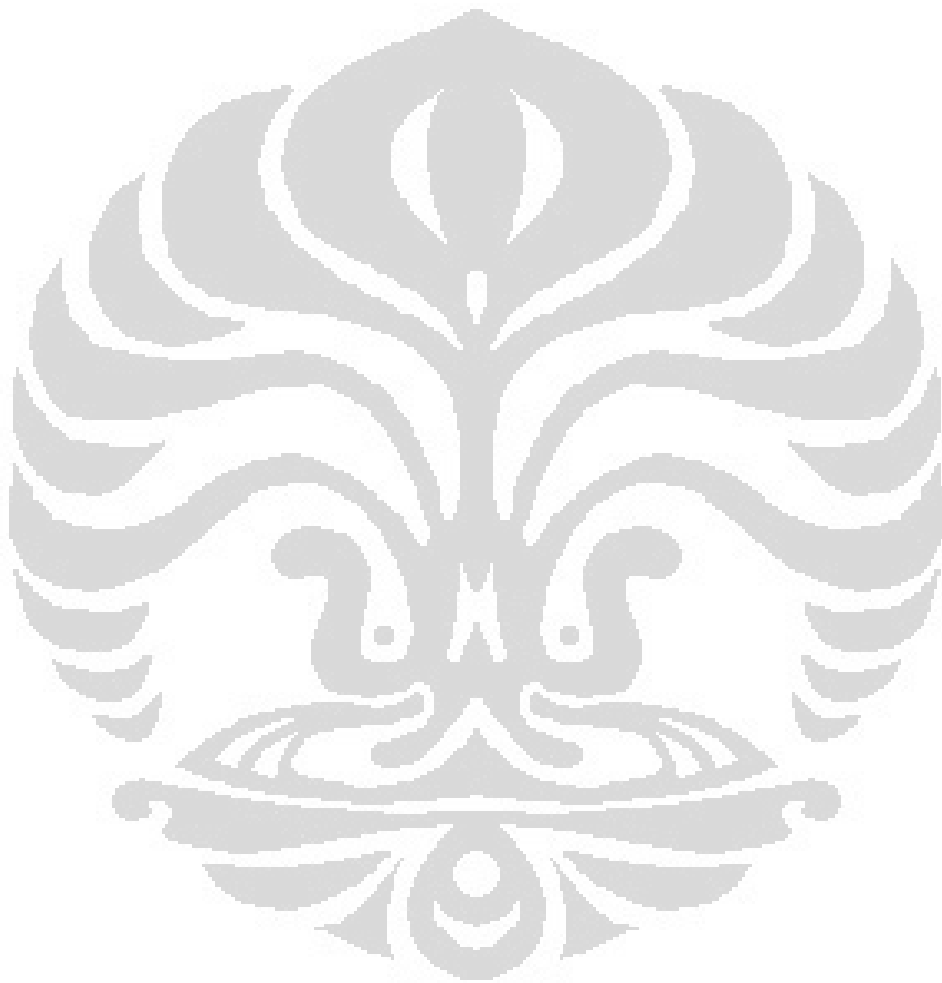
Pada tahun 2004, pemerintah menerbitkan strategi inklusi pertama keuangan yang berjudul *Promoting Financial Inclusion*, serta mengumumkan pembentukan dana khusus dengan anggaran sebesar 120 juta Euro untuk dibelanjakan antara 2004 dan 2007.¹⁰⁰ Tujuan kebijakan ini adalah:

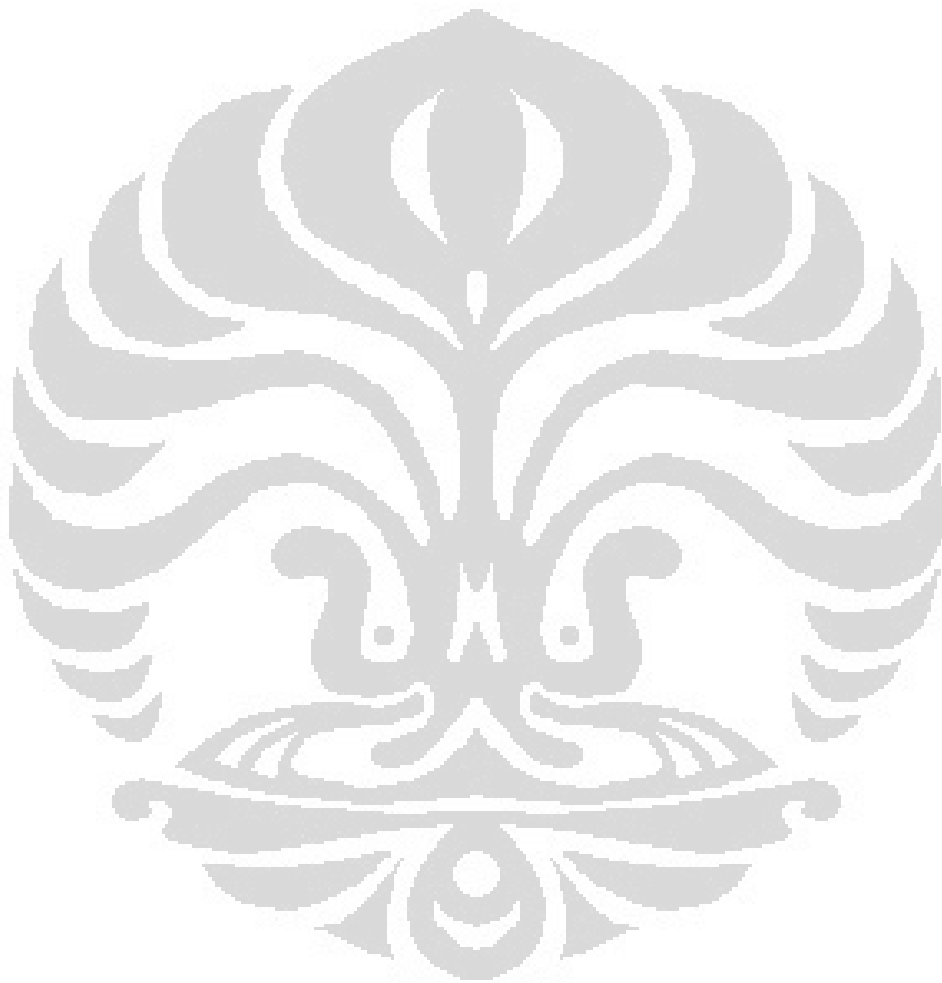
⁹⁷ *Loc. Cit, The Role of Islamic Banks in Non-Muslim Countries*

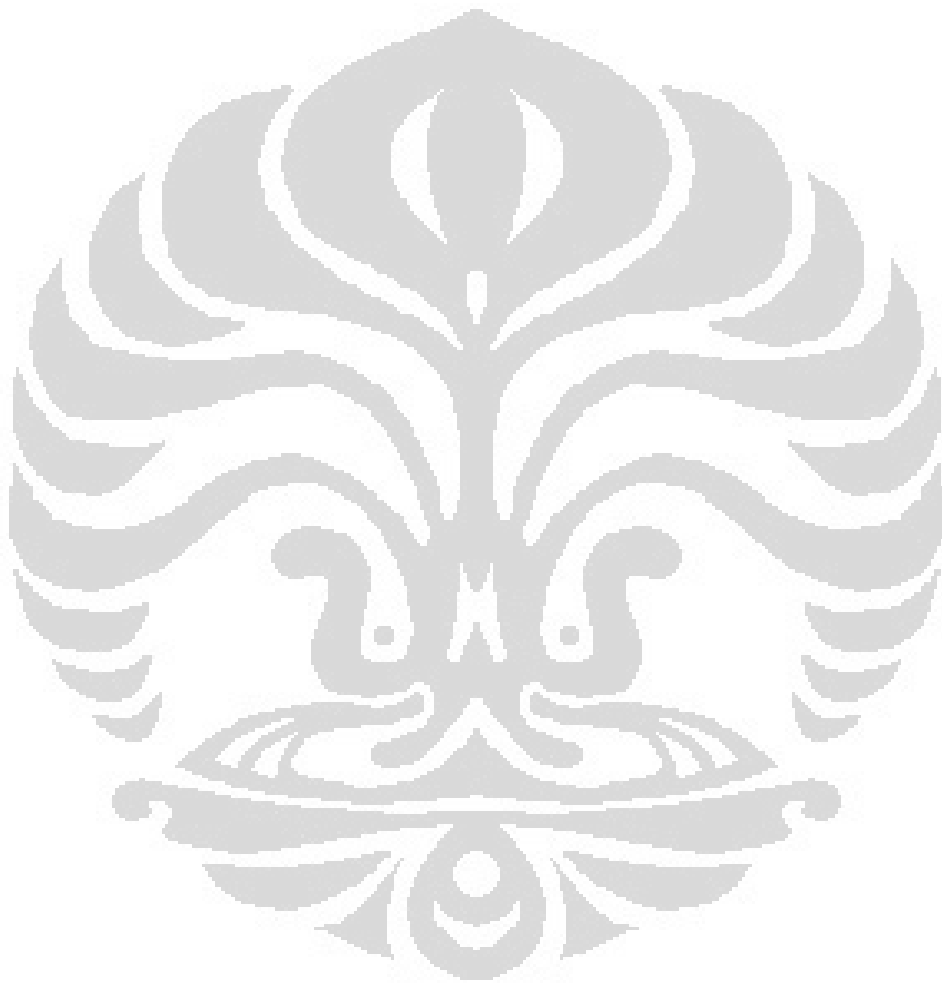
⁹⁸ *Loc. Cit, The Role of Islamic Banks in Non-Muslim Countries*

⁹⁹ Mohamed Hersi, *The role of Islamic finance in tackling financial exclusion in the UK*, Doctoral thesis, Durham University, 2009, hlm. 17

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 20







MCB mengirimkan utusan resmi setiap tahun untuk *World Islamic Economics Forum* (WIEF); para delegasi menekankan dan melakukan promosi dan advokasi agar London diakui sebagai pusat terkemuka untuk ekonomi dan keuangan Islam. Tanpa kontribusi aktif dari MCB, peran London pada ekonomi dan keuangan Islam tidak akan berkembang lebih cepat.

3.3 Peran Penting Hubungan Kerja Sama Bank Syariah Internasional Antara Inggris – Timur Tengah

Peran Pemerintah Inggris dalam keberhasilan perbankan Islam ini penting, karena akan menentukan apakah perbankan Islam terus berkembang di Inggris. Hal ini diperlukan untuk pembentukan Inggris sebagai pusat ekonomi Islam karena kebutuhan untuk menginvestasikan uang dalam penggunaan murabahah dan ijarah.

Keahlian dalam pasar Islam cukup terbatas, karena sebagian besar bankir Inggris masih belajar prinsip-prinsip di belakang industri perbankan Islam. Jadi ada kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan untuk mengembangkan instrumen ekonomi Islam dan industri itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah universitas menawarkan Perbankan Islam dan kuliah keuangan di semua tingkatan untuk mahasiswa dan profesional. Masa depan perbankan Islam didasarkan pada teknologi, karena lebih dari setengah populasi Muslim Inggris saat ini berada di bawah usia dua puluh satu.¹⁰³

Dengan meningkatkan kemampuan teknologi, potensi ekspansi perbankan Islam menjadi sangat luas. Bank-bank akan dapat mengatasi biaya distribusi yang mahal dalam memberikan pelayanan kepada penduduk muslim di seluruh Inggris. Karbhari mengidentifikasi bahwa, untuk menuju situasi yang lebih makmur, perbankan syariah perlu menyelesaikan peraturan modal minimum Komite Basel (Basel Committee) dan kebutuhan likuiditas.¹⁰⁴

¹⁰³ Islamic Finance Council Publication, January-February 2007, hlm. 9

¹⁰⁴ Nicholas Dylan Ray, *Arab Islamic Banking and the Renewal of Islamic Law*, (London:

Bank konvensional memegang aset mereka di deposito berbunga tetap dan *Basel Committee* memperkirakan hal ini akan menjadi risiko keamanan yang relatif lebih rendah. Di sisi lain bank Islam lebih banyak berinvestasi pada proyek jangka panjang dan usaha. Karbhari berpendapat bahwa bank syariah menjaga kebutuhan likuiditas aset berisiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional.

Angka menunjukkan bahwa pada tahun 1996, hanya 20% dari pembiayaan didasarkan pada *Mudharabah*.¹⁰⁵ Layanan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* sebetulnya mirip dengan produk keuangan yang ditemukan di bank konvensional dan menghilangkan kebutuhan untuk Bank Islam karena mereka adalah produk yang unik dan berbeda. Kurangnya permintaan untuk produk ini akan menyebabkan bank-bank Islam untuk berhenti menawarkan mereka dan membatasi pertumbuhan mereka di Inggris. Dar dan Presley mengidentifikasi bahwa usaha pembiayaan modal sebetulnya mirip dengan mekanisme transaksi *Murabahah* yang relatif tidak populer yang berkaitan dengan pembiayaan pribadi.¹⁰⁶

Croft juga mengakui bahwa di luar negara-negara Muslim, Inggris telah menunjukkan hasil yang paling positif dan akan muncul di Inggris adalah memenangkan perlombaan untuk menjadi pemimpin dalam perbankan Islam barat. Wali Kota London, Nick Anstee mengumumkan dalam konferensi pers yang telah dicapai sejauh ini, dengan 20 penerbitan Sukuk sejumlah 11 miliar US\$, 22 bank, 5 bank syariah dan lembaga yang menawarkan produk pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi Islam.¹⁰⁷

Prestasi ini akan membantu memantapkan keunggulan mereka dan kerjasama yang lebih baik dengan Inggris dalam menawarkan layanan yang lebih komersial untuk publik. Croft percaya bahwa ekonomi dan keuangan Islam

Graham and Trotman, 2005), hlm. 90–91.

¹⁰⁵ Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, (The Hague: Kluwer Law International 2008), hlm. 45

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 46-47

¹⁰⁷ Aamir Rehman and S. Nazim Ali, "Breakthrough Ideas for 2008—Islamic Finance: The New Global Player," *Harvard Business Review*, February 2008, hlm. 4

diperkirakan akan tumbuh pada rata-rata 47 persen per tahun mencapai 2,8 miliar US\$ pada tahun 2009. Sehubungan dengan asuransi, HSBC Amanah menyatakan bahwa volume bisnis HSBC Amanah tumbuh 82 persen pada tahun 2008.¹⁰⁸ Ini adalah bukti bahwa perbankan Islam tidak hanya besar secara finansial, tetapi juga meningkat jauh dan tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran di Inggris.

Terlepas dari potensi hambatan bagi keuangan Islam, globalisasi sebetulnya memberikan kesempatan-kesempatan baru. Dinamika ekonomi dan keuangan Islam menjadi semakin luas dan memungkinkan umat Islam untuk melakukan urusan keuangan mereka dengan nilai-nilai Islam. Klien dari Barat dan non-Muslim telah menunjukkan kesediaan mereka untuk menggunakan sistem ekonomi dan keuangan Islam, karena prinsip dan keuntungan yang semakin menarik.

HSBC Amanah, misalnya, telah menemukan bahwa 20 persen dari klien mereka di Malaysia adalah etnis Cina yang beragama non-Muslim. Keuangan Islam menambah nilai sistem keuangan internasional dan mendorong non-Muslim untuk berpikir lebih serius tentang masalah utang, dari yang disebabkan oleh pinjaman di pasar kredit konsumen sampai kepada masalah utang negara berkembang.

Tantangan globalisasi memberikan hasil positif bagi regulasi dan mekanisme pasar. Keuangan Islam seharusnya tidak hanya dinilai dari dampak kuantitatif pada pasar global, tetapi lebih kepada kualitas layanan dan pengaruhnya terhadap persepsi dan pemikiran pemain keuangan global. Pada akhirnya keuangan Islam adalah lebih lanjut tentang nilai dari akumulasi sekedar uang. Keuangan Islam juga memperhatikan tanggung jawab sosial, termasuk bahwa orang kaya terhadap orang yang kurang beruntung dalam urutan seringkali terlalu egois (ekonomi global yang didasarkan pada keserakahan ketimbang keadilan ekonomi).

¹⁰⁸ Sir Howard Davies, *Islamic Finance and the FSA*, Review of Islamic Economics, No. 34, 2008, hlm. 7

Dua tren penting telah meningkatkan integrasi keuangan Islam ke dalam sistem keuangan internasional, yakni percepatan pembangunan pasar keuangan Islam dan peningkatan liberalisasi. Perkembangan di pasar keuangan Islam telah memberikan kontribusi terhadap ketersediaan spektrum yang luas dari instrumen keuangan Islam.

Semakin tinggi tingkat partisipasi asing di pasar keuangan Islam yang telah menghasilkan peningkatan arus lintas batas dalam sistem keuangan Islam internasional, semakin tinggi pula arus transaksi keuangan antara sistem keuangan Islam dan konvensional. Liberalisasi juga menghadirkan institusi asing yang lebih dalam sistem keuangan Islam dan menghasilkan peluang inovasi yang lebih besar dalam tataran global.

3.4 Ekonomi Islam: *Good Business and Good Politics?*

Meskipun sistem ekonomi dan keuangan Islam belum menjadi bagian utama dari aktivitas pasar keuangan global, tetapi sistem ini memiliki dampak yang signifikan terhadap daur ulang petrodolar (*petrodollar recycling*) dan diversifikasi ekonomi bagi negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah. Partisipasi pasar telah berkembang di luar bank syariah termasuk bank konvensional, bank investasi, dan berbagai non-bank lembaga keuangan, termasuk ekuitas swasta, keuangan mikro, dan perumahan, menurut penelitian Goldman Sachs.¹⁰⁹

Manfaat dari sejumlah kebijakan dan regulasi yang menguntungkan di London memberikan keunggulan kompetitif atas New York sebagai pusat keuangan Islam di antara negara-negara Barat. Pada bulan Januari 2007, Ed Balls mengumumkan langkah-langkah yang mengarah pada penerbitan sukuk untuk pertama kali di dunia Barat dan membuat sistem ekonomi dan keuangan Islam menjadi prioritas utama dari Chancellor's *High-Level Group* (HLG).¹¹⁰

¹⁰⁹ Diakses dari www.cablegatesearch.net/cable.php?id=07LONDON2369, pada tanggal 5 Juni 2012, 23.12 WIB

¹¹⁰ UK Trade & Investment Report, *Government's Perspectives*, hlm. 6

Pertama, Januari 2007, kesepakatan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara *International Capital Market Association* (ICMA) dengan *International Islamic Finance Market* (IIFM) untuk mengembangkan standar kontrak dan operasional pasar untuk sukuk. Kedua, peluncuran Kualifikasi Keuangan Islam pada tahun 2006.¹¹¹

Di sisi lain, *UK Trade & Investment* (UKTI) ditugaskan untuk mengembangkan strategi untuk menjadikan Inggris sebagai *gateway* untuk keuangan Islam yang merupakan bagian dari strategi mereka yang lebih luas membuat London pusat keuangan internasional terkemuka. Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, HM Treasury, dan UKTI umumnya sepakat pada beberapa poin: Pertama, volume industri keuangan Islam tidak akan menyamai volume industri keuangan konvensional global. Kedua, tujuan utama pemerintah Inggris adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan struktural untuk keuangan Islam di Inggris dan kemudian membiarkan pasar menentukan produk apa yang ditawarkan. Ketiga, meskipun pemerintah Inggris mendukung keuangan Islam dengan alasan murni ekonomi, pemerintah Inggris sebenarnya mengakui bahwa ekonomi Islam adalah katalisator politik yang baik demi membina hubungan diplomatik yang baik dengan mayoritas negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak. Terlebih lagi, mendukung sistem ekonomi dan keuangan Islam di tingkat internasional akan memperluas ketersediaan produk berbasis syariah seperti kredit rumah, asuransi, deposito, dll. Hal ini tentunya akan menguntungkan 1,8 juta muslim Inggris yang kebanyakan bukan berasal dari orang kaya Arab, tetapi etnis India dan Pakistan yang kondisinya rendah. Keempat, pertumbuhan keuangan Islam tidak memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Inggris secara utuh. Dengan kata lain, sistem ekonomi dan keuangan Islam menawarkan berbagai pilihan yang prospektif bagi investor, tetapi tidak meningkatkan pengaruh buruk terhadap sistem perekonomian maupun kondisi politik Inggris.

Penulis setuju dengan pandangan bahwa London menempati posisi yang strategis untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik dari dukungan

¹¹¹ *Loc. Cit.*, www.cablegatesearch.net/cable.php?id=07LONDON2369, 23.15 WIB

keuangan Islam. Tetapi, ada sedikit potensi investor dalam keuangan Islam untuk mempengaruhi kebijakan Inggris. Komitmen Inggris untuk memerangi terorisme misalnya, tidak mungkin dipengaruhi oleh sentimen sistem ekonomi dan keuangan Islam ini. Jika ada, pertumbuhan pasar keuangan Islam diatur dengan baik dan transparan untuk mendeteksi jaringan bisnis informal yang disukai oleh teroris.

Pasar keuangan Islam di Inggris terutama ditujukan untuk kaum muslim Inggris, tetapi instrumen keuangan Islam yang tersedia berlaku universal. Produk termasuk sukuk, investasi alternatif, dan takaful, yang mirip dengan produk perbankan konvensional. Untuk investasi dalam keuangan Islam di luar Timur Tengah, Inggris adalah pilihan utama, menurut *roundtables* yang diselenggarakan oleh *Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI)*.¹¹²

Direktur MCB menyatakan bahwa banyak investor merasa London sudah menjadi pusat keuangan Islam sebelum pemerintah Inggris mendeklarasikannya.

Kahf menyebutkan bahwa ini adadalah konsep “Londonistan”, konsep yang sering dibicarakan orang-orang yang berasal dari Timur Tengah, yakni konsep yang menganggap bahwa London adalah tempat terbaik untuk melakukan kerja sama di bidang ekonomi Islam di negara-negara Barat. Artinya, investor melihat Inggris sebagai tempat terbaik untuk memulai ekspansi ke Eropa karena tingkat keterbukaan ekonomi yang lebih tinggi, dukungan pemerintah Inggris dan FSA dalam memajukan sistem ekonomi dan keuangan Islam, dan keyakinan bahwa model bisnis Inggris dapat direplikasi di seluruh Uni Eropa.

Krisis finansial global 2008 telah meningkatkan keinginan pemerintah Inggris untuk terus mendorong sektor keuangan Islam. Tetapi sampai saat ini, pemerintah Inggris belum melakukan langkah yang berarti, meskipun industri ini relatif lebih aman ketika diguncang krisis finansial. “Di saat-saat seperti ini, penting bagi pemerintah Inggris untuk membuat sebagian besar sektor ekonomi terus tumbuh positif seperti keuangan Islam.”, menurut Andrew Cahn, *chief*

¹¹² Diakses dari <http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=08LONDON24>, pada tanggal 5 Juni 2012, 22.10 WIB

executive dari UKTI.¹¹³ UKTI juga mendukung gerakan *Association of Corporate Treasurers* (ACT) untuk mendidik perusahaan Inggris pada sektor keuangan Islam dan mencari peluang – peluang baru agar tetap tumbuh selama krisis keuangan.

Pihak HM Treasury menegaskan bahwa ketidakstabilan keuangan dalam ekonomi global tidak boleh menghalangi pemerintah Inggris dari tujuan jangka panjangnya untuk keuangan Islam, dan pemerintah Inggris akan terus mendukung perkembangan keuangan Islam di Inggris. Keuangan Islam merupakan industri kecil tapi berkembang pesat untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan London sebagai pusat keuangan global. Dengan minoritas Muslim di Inggris yang cepat berkembang, pemerintah Inggris juga mengakui keuntungan politik sebagai keuntungan lain dari keuangan Islam.

¹¹³ *Loc. Cit.*, <http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=08LONDON24>, pada tanggal 5 Juni 2012, 22.15 WIB

BAB IV

KESIMPULAN

Di Eropa, Inggris menjadi negara pertama yang mempromosikan dan mendorong bisnis keuangan syariah dan sedang dalam proses menjadikan keuangan Islam masuk dalam praktik keuangan Inggris dengan memperkenalkan UU baru yang memfasilitasi pangsa pasar baru, yaitu kaum muslim, di sana. Menurut Badan Statistik Inggris, asal kaum muslim di Inggris adalah 41% dari Pakistan, 13% dari Bangladesh, dan 11% dari India.

Berdasarkan pada survei yang dilakukan The Runnymede Trust, muslim dari Timur Tengah dan Afrika mewakili 24% jumlah seluruh muslim di Inggris Raya. Namun, tantangan yang menghambat adalah masih kuatnya sikap islamofobia di tengah warga asli Inggris pada khususnya dan Eropa pada umumnya. Padahal, perkembangan perbankan Islam di Eropa sudah tidak dapat dihindari lagi karena kini mulai menasar pada bisnis ritel dan konsumen dari kalangan tertentu bersamaan dengan adanya dua kekuatan dominan di pasar. Seperti yang telah penulis jelaskan, peluang pasar bagi bisnis perbankan ritel sangat besar di Eropa dan secara bersamaan volume transaksi yang mungkin terjadi secara kelembagaan lebih besar lagi peluangnya bagi lembaga keuangan Islam.

Inggris telah mengambil kepemimpinan di Eropa dalam mempromosikan dan mendorong kegiatan perbankan Islam, tetapi semua itu hanya dipusatkan pada bisnis perbankan ritel dan baru-baru ini saja dikembangkan ke arah perbankan investasi.

Penelitian ini menemukan bahwa, perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam di Inggris dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik Inggris. Kepentingan ekonomi Inggris dalam penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah penarikan investasi dari kawasan GCC. Merujuk kepada

data yang telah penulis sajikan mengenai SWF, FDI, dan Petrodolar, ketiga investasi ini merupakan alasan utama untuk pengembangan sistem ini di Inggris yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Inggris. Namun, penulis menemukan bahwa FDI tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam di Inggris karena jumlah FDI yang berasal dari Timur Tengah sangat minim. Sedangkan, kepentingan politik Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah pencegahan *financial exclusion* terhadap populasi minoritas muslim yang tergabung dalam *Muslim Council of British* dan menuntut adanya produk perbankan Islam.

Mengingat jumlah akumulasi modal asing yang sangat besar di negara-negara GCC, khususnya dalam SWF, sebagian besar negara di dunia telah mengembangkan strategi untuk menarik dana tersebut untuk mengatasi kekurangan modal mereka. Dalam hal ini, Inggris berperan besar sebagai negara Barat pertama yang sukses mengadopsi sistem ekonomi dan keuangan Islam sejak tahun 2004 dengan pendirian IBB. Karena sebagian besar investor GCC bertujuan untuk melakukan investasi dengan pembiayaan Islam, Inggris menanggapi kondisi ketersediaan modal dengan mengembangkan kerangka kerja nasional untuk memfasilitasi sistem perbankan dan keuangan Islam.

Melalui strategi tersebut, *financial exclusion* terhadap masyarakat Muslim dapat diatasi sebagai efek lain dari proses pengambilan kebijakan. Perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam di Inggris, dalam hal ini, patut dicontoh oleh negara Barat lainnya yang ingin menangkap peluang diversifikasi ekonomi melalui penerapan sistem ini.

Kecenderungan di Inggris adalah para bankir dari bank Islam yakin bahwa mencari keuntungan hanya dari nasabah biasa padahal pasar bagi lembaga-lembaga besar masih menjadi ruang lingkup yang baru bagi perbankan Islam untuk meretas jalan menuju pasar Eropa. Selanjutnya, munculnya perbankan Islam ternyata menjadi fakta bagi pemerintah Inggris untuk melakukan upaya khusus agar London dapat menjadi pusat dunia bagi industri ekonomi syariah.

Dalam hal ini, peran pemerintah Inggris dalam memfasilitasi perluasan perbankan Islam di negara ini luar biasa. Sejak awal 2000-an Pemerintah telah memperkenalkan serangkaian perubahan pajak dan legislasi khusus yang dirancang untuk menghilangkan hambatan bagi pengembangan keuangan Islam. Perubahan yang pertama adalah Undang-Undang (UU) Keuangan 2003 yang diperkenalkan untuk mencegah pembayaran ganda *Stamp on Duty Land Tax* (SDLT) pada *Islamic mortgage*. Kemudian, UU Keuangan 2005 dan 2006 adalah langkah-langkah lebih lanjut yang bertujuan untuk menempatkan produk Islam di level pajak yang sama dengan produk perbankan konvensional.

UU Keuangan 2007 diklarifikasi lebih lanjut dalam kasus Sukuk. Pada bulan Maret 2008, Sukuk pertama pemerintah Inggris tercatat di London Stock Exchange sebesar 350 juta US\$ yang diterbitkan oleh Bahrain dan disusun sesuai dengan hukum Islam. Pada akhir tahun 2008 lisensi untuk sebuah bank investasi Islam juga diajukan oleh Gatehouse PLC, anak perusahaan Kuwait Global Securities House yang beroperasi di Inggris.

Peran London sebagai pusat keuangan Islam ini diperkuat oleh faktor-faktor yang telah diuraikan penulis. Keuangan konvensional dan Islam secara inheren ternyata bisa kompatibel dalam prakteknya. Keuangan Islam tidak hanya dianggap sebagai pelengkap konservatif untuk pasar keuangan konvensional, tetapi dapat dikatakan bahwa keuangan Islam juga dapat memberikan kerangka kerja yang sangat dibutuhkan, yaitu etika serta koreksi yang berguna terhadap eksese-eksese dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional.

Sistem ekonomi dan keuangan Islam, dalam hal ini, mampu menempati peranan sebagai pelengkap dan inheren untuk menstabilkan keuangan konvensional tidak hanya dengan memperkenalkan produk-produk keuangan konservatif ke pasar keuangan, tetapi juga dengan memberikan kontribusi terhadap diversifikasi pasar keuangan.

Meskipun begitu, bank-bank Islam menghadapi hambatan penting untuk bersaing secara kompetitif dengan bank konvensional. Saat ini, kekurangan seperti instrumen keuangan Islam yang lebih mahal, pelayanan yang kurang berorientasi,

dan tidak responsif terhadap inovasi, berimplikasi negatif terhadap perkembangan pasar konsumen dan *trade financing* di negara-negara Muslim. Keuangan Islam dengan cepat memantapkan dirinya di beberapa pasar, tetapi penyebaran dan pertumbuhannya akan tergantung pada bagaimana tantangan utama mampu diatasi, termasuk *public awareness* terhadap keuangan Islam, kompatibilitas kerangka peraturan, serta hambatan untuk inovasi produk keuangan.

Sebagai kesimpulan akhir, menurut penulis, bank Islam di Barat harus menentukan kebijakan yang tepat dalam: 1) menciptakan layanan perbankan yang komprehensif, 2) mengatasi keseimbangan kebijakan ekonomi, 3) mengembangkan teknologi dengan standar perbankan internasional, 4) membangun hubungan baik dengan Bank Asing, dan 5) mempertimbangkan integrasi atau *merger* antara bank Islam dengan bank konvensional atau sebaliknya. Kelima hal ini, akan menjadi faktor penentu dalam perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam di Inggris dan dunia Barat di tahun-tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Khursid. 1997. *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*. Jakarta: Risalah Gusti.
- Chapra, Umer. (2007). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation
- Choudhury, Masudul. (2001). *Islamic Economics: A History*. London: Routledge
- Haron, Sudin. (1997). *Islamic Banking Rules and Regulations*. Selangor: Pelanduk Publications.
- Iqbal, Munawar dan David Llewellyn. (2002). *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Risk*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.
- HSBC Amanah. (2010). *Islamic Finance: Glossary of Terms and Contracts*. London: Chartered Institute of Management Accountants.
- Khan, Fahim dan Mario Porzio. (2010). *Islamic Finance in Europe*. UK: Edward Elgar Publishing
- Khan, Muhammad Akram. (1999). *Islamic Economics and Finance*. London: Routledge.
- Millar, Roderick dan Habiba Anwar. (2008). *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investment*. London: GMB Publishing
- Mitton, Lavinia. (2009). *Financial Inclusions in the UK*. Joseph Rowntree Foundation
- Mohieldin, Muhammad dan Zamir Iqbal. (2009). *The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion*. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance.
- OECD World Fact Book. (2008).

- Porter, Michael. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press
- Ray, Nicholas Dylan. (2005). *Arab Islamic Banking and the Renewal of Islamic Law*. London: Graham and Trotman
- van Greuning, Hennie dan Zamir Iqbal. (2008). *Risk Analysis on Islamic Banking*. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank Publication.
- Visser, Hans. (2009). *Islamic Finance: Principles and Practice*. UK: MPG Books.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. (2008). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*. The Hague: Kluwer Law International
- Warde, Ibrahim. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press
- Wilson, Rodney. (2008). *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investment*. London: GMB Publishing
- _____. (2009). *The Development of Islamic Finance in the GCC*. Working Paper of the Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States. The Centre for the Study of Global Governance, London School of Economics.

Jurnal

- Abbadi. (2003). *The integration of Islamic banking system and its positive effects on the Islamic world*. Fifth Islamic Forum
- Ahmad, Ausaf. (2000). *Economic Development in Islamic Perspective: Revisited*. Review of Islamic Economics, No. 9.
- Ali, S. Nazim & Abdur Rahman Syed. (2009). *Post-9/11 Perceptions of Islamic Finance*. Chicago: International Journal of Finance and Economics.
- Aggrawal & Yousef. (2000). *Islamic banks and Investment Financing*. Journal of Money, Credit, and Banking. Vol. 32.
- Balding, Christopher. (2008). *A Portfolio Analysis of Sovereign wealth Funds*. University of California Press.
- Balin, Bryan J. (2008). *Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis*. Washington: The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS)

- Chapra, Umer. (1985). *Towards a Just Monetary System*. London: The Islamic Foundation.
- Davies, Sir Howard. *Islamic Finance and the FSA*. (2008). Review of Islamic Economics, No. 34.
- Edwards, W. (2009). *Islamic Banking*. Princeton Economic Journal, First Quarter.
- EI-Gamal, M.A. (1997). *Can Islamic Banking Survive? A Micro- Revolutionary Perspective*. Working Paper, Department of Economics, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin
- Erler, Daniela. (2009). *Islamic Finance: Complement or Substitute? An Empirical Analysis*. Middlebury: The Michigan Journal of Business.
- Federal Reserve Bank of New York Report Vol. 12, No. 9. (2006). New York.
- FSA Report. (2010). *The FSA's International Agenda*. London.
- Hasan, Zubair. (2007). *Economic Development in Islamic Perspective: Concept, Objectives, and Some Issue*". MPRA Paper No. 3011.
- Henry, Clement M. (1996). *The Mediterranean Debt Crescent: Money and Power in Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey*. University Press of Florida.
- How the Bond Market Works*. (1988). New York: the New York Institute of Finance.
- Islamic Finance Council Publication. (2007). London.
- Kahf, Monzer. (1994). *Budget Deficits and Public Borrowing Instruments In an Islamic Economic System*. Chicago: The American Journal of Islamic Social Sciences.
- Muslim Council of Britain Journal. (2009). *London and Islamic Finance*. London.
- Rehman, Aamir & S. Nazim Ali. (2008). *Breakthrough Ideas for 2008—Islamic Finance: The New Global Player*. Harvard Business Review.
- Sadeq, A.H.M. (1987). *Economic Development in Islam*. Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1.
- The City UK Publication. (2011). *Islamic Finance*. London.
- Wilson, Rodney. (2007). *Islamic Finance in the UK: Regulations and Challenges*. London: FSA Document.

Artikel Internet

- “FDI Policies”. 2 Maret 2012. <http://www.economywatch.com/foreign-direct-investment/policy.html>
- “Introduction to Islamic Economics”. 3 Desember 2011. [http://www.albalagh.net/Introduction-to-Islamic Economics](http://www.albalagh.net/Introduction-to-Islamic-Economics)
- “Islamic Finance and Diversity in Financial Markets”. 1 Mei 2012. <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/register/islamic-finance-and-diversity-in-financial-markets.htm>
- “Islamic Finance: Business and Politics”. <http://www.cablegatesearch.net/cable.php?=-07LONDON269>
- “Issues and Relevance of Islamic Finance in Britain”. 5 Desember 2011. www.islamic-banking.com/ibanking/php.
- “The basic principles of Islamic Economy and their effects on accounting standards-setting”. 25 Februari 2012. <http://www.accountancy.com/articles.asp>
- “The Role of Islamic Banks in Non-Muslim Countries”. 5 Juni 2012. <http://www.cibafi.org/NewsCenter/English/SavePage.aspx>
- “UK Business Potentials 2011”. 2 Maret 2012. <http://investinuk.net/uk-business-potentials-2011.chp>
- “UK Economic Indicators”. 7 Juni 2012. http://www.economywatch.com/world_economy/united-kingdom/uk-economic-indicators.html
- “UK's Islamic Finance”. 1 Mei 2012. <http://www.ukifc.com/about>
- “Why Islamic Economic?”. 3 Desember 2011. <http://www.zawya.com/cid214321>.

Skripsi

- Hersi, Muhammad. *The role of Islamic finance in tackling financial exclusion in the UK*. Doctoral thesis. Durham University
- Smith, Kristin. *Islamic Banking and the Politics of International Financial Harmonization*. Master thesis. Harvard University

LAMPIRAN

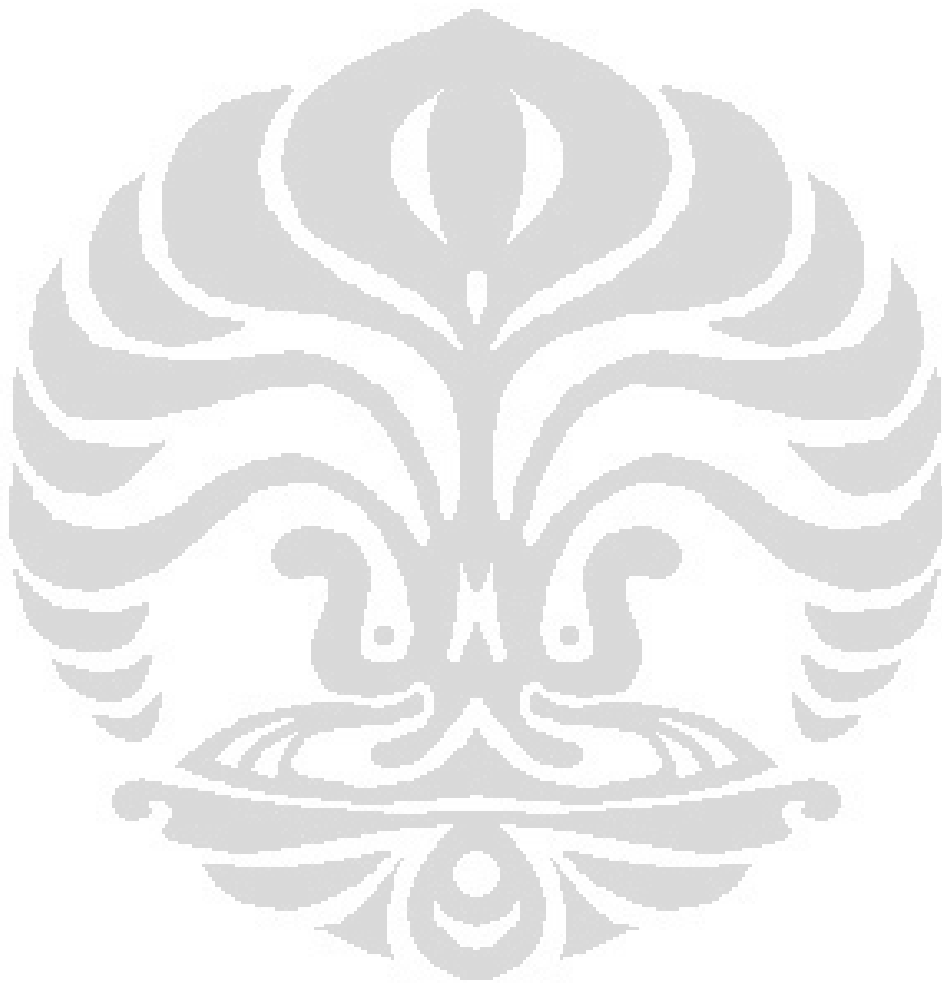
Lampiran 1 UK Trade & Investment: UK's Excellence in Islamic Finance

The United Kingdom has become the key Western centre for Islamic Finance and London is its world-leading financial services centre. Although the UK has been providing Islamic Financial Services for 30 years, it is recent developments that have contributed to it becoming the Western centre of choice in the provision of Islamic Finance. Government support and a favourable regulatory environment are encouraging Islamic banks to set up operations in the UK. The establishment of an enabling fiscal and regulatory framework in the UK for Islamic Finance since 2003 has resulted in a number of advantages:

- The removal of double tax on Islamic mortgages and the extension of tax relief on Islamic mortgages to companies, as well as to individuals;
- Reform of arrangements for issues of debt so that returns and income payments can be treated as if it were interest. This makes London a more attractive location for issuing and trading sukuk;
- initiatives by the Financial Services Authority (FSA) to ensure that regulatory treatment of Islamic Finance are consistent with its statutory objectives and principles.

Western banks are also meeting the demand for Islamic Finance Services through the expansion of their Islamic Finance offering. Ten major global banks operating in the UK have set up units to provide Islamic financial services. They have been joined by no fewer than 12 Islamic banks, giving the UK more than four times the number of banks offering Islamic Financial Services than any other country in Western Europe. For example, Switzerland has five and France and Luxembourg each have four.

Globally, the demand for Islamic Finance is clear. The market for Islamic Financial Services, as measured by Shariah-compliant assets, is estimated to have



Lampiran 2 Parliament UK: Islamic Finance and Market Diversification

ISLAMIC FINANCE AND DIVERSITY IN FINANCIAL MARKETS

TITLE	Associate Parliamentary Group on Islamic Finance and Diversity in Financial Markets			
PURPOSE	To give the Islamic finance industry a voice in the House in order to address issues of concern, specifically but not limited to Sovereign Sukuk and positioning the UK as the European hub of Islamic financial services, and to address other issues as they arise, such as inclusivity, diversity, Islamic LIBOR, regulation and taxation.			
OFFICERS				
Title	Name			Party
Chair	Roger Williams			LD Con
Vice-Chairs	Lord Sheikh			LD Lab
	Lord Newby			LD
	Andy Slaughter			LD
Treasurer	Barones Nicholson of Winterbourne			
Secretary	Lord Smith of Clifton			
TWENTY QUALIFYING MEMBERS				
Government Party		Main Opposition Party		Other
1	Roger Williams – LD Lord Sheikh - Con	Lord Stone of Blackheath	Lord Adebowale	CB Green
2	Lord Newby of Rothwell - LD	Huw Irranca-Davies	Caroline Lucas	PC
3	Lord Smith of Clifton - LD	Andy Slaughter	Elfyn Llwyd	
4				

5	Steven Baker – Con	Jim Fitzpatrick		
6	Lord Teverson - LD	Martin Caton		
7	Dan Rogerson – LD	Lord Ahmed		
8	Baroness Falkner of Margravine - LD	George Howarth		
9	Lord Jones of Cheltenham – LD			
10	John Hemming – LD			
CONTACT DETAILS FOR CORRESPONDENCE AND GENERAL ENQUIRIES ABOUT THE GROUP				
Mr Roger Williams MP, House of Commons, London SW1A 0AA. Tel: 020 7219 8145				
BENEFITS RECEIVED BY GROUP FROM SOURCES OUTSIDE PARLIAMENT				
Hy Consulting (a consultancy) acts as the group’s secretariat. £5000 from Clifford Chance and £5000 from Bank of London and the Middle East (registered March 2012).				
NAME OF ANY STAFF TO THE GROUP WHO HOLD AN APG PASS				
None.				
DATE OF GROUP’S LAST REGISTERED ANNUAL GENERAL MEETING				
11 July 2011				
CATEGORY OF GROUP				
Associate Parliamentary Subject Group.				

Sumber: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/register/islamic-finance-and-diversity-in-financial-markets.htm>

Lampiran 3 Financial Inclusions

Inclusion through Risk-sharing in Islamic Finance:

1. Islamic economics promotes the notion of risk-sharing based on the principle of liability.
2. It states that profit is justified on the basis of taking responsibility, same case applies for loss and its related consequences.
3. Islam prohibits, and without any exceptions, explicit and implicit interest-based contracts of any kind.
4. Qoran clearly renders exchange and trade of commodities or/and assets the foundation of economic activity in the Islamic Paradigm.
5. Islam proposes a mutual exchange (al-bay') in which one bundle of property rights is exchanged for another, thus allowing both parties to share the risks of the transaction.
6. Providers of Islamic microfinance tend to be small in size. 80 percent of the global outreach of Islamic microfinance concentrates in only three countries, Indonesia, Bangladesh, and Afghanistan.
7. Islamic microfinance products are also limited in their diversity. Over 70 percent of the Islamic finance products offered are murabaha (cost plus), which is a lending product typically used for working capital.
8. Efforts are under way to broaden access to Shariah-based finance. Egypt: Bank Misr plans to introduce Islamic microfinance activities to its 33 Islamic branches, and also develop a mudaraba (profit sharing agreement) product in addition to the murabaha product; – Yemen: Tadhamon Islamic Bank opened a MSE division in late 2006; – UAE: Noor Islamic Bank and Emirates Post Holding Group announced plans to establish a company to offer Sharia-compliant financial services